

**IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN PADA KELOMPOK
SIMPAN PINJAM KHUSUS PEREMPUAN DI DESA
DUKUHSETI KECAMATAN DUKUHSETI KABUPATEN PATI
TAHUN 2015**

SKRIPSI

DISUSUN UNTUK MEMENUHI TUGAS DAN MELENGKAPI
SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA S.1
DALAM ILMU EKONOMI ISLAM



Oleh:
SITI FAIQOTUN NIKMAH
132411176

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN

Bismillāhirrahmānirrahīm, dengan penuh tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya penulis sendiri. Di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi. Berisi pengetahuan yang didapat dari hasil penerbitan yang sumbernya diterangkan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 21 Juni 2015
Pembuat Pernyataan,

Siti Faiqotun Nikmah

NIM: 132411176



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) NgaliyanTelp. (024) 7601291 Semarang 50185

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Siti Faiqotun Nikmah
NIM : 132411176
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Pedesaan Pada Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan Di Desa
Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tahun 2015.

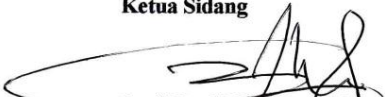
Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaud/ baik/ cukup, pada tanggal 19 juli 2017

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2017.

Semarang, 20 juli 2017

Mengetahui,

Ketua Sidang


Prof. Dr. H. Mujiono, M.A.
NIP. 195902151985031005

Sekretaris Sidang


Drs. Saekhu, MH
NIP. 19690120 199403 1 004

Penguji I,


Ratno Agrivanto, M.Si., A.Kt.
NIP. 198001282008011010

Penguji II


A. Firmudi, S.H., M.Ag.
NIP. 196907082005011004

Pembimbing I,


Drs. Saekhu, MH
NIP. 19690120 199403 1 004

Pembimbing II,


Heny Yuningrum, SE., M.Si
NIP. 19810609 200710 2 005

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ^ط وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

وَالْعُدْوَانِ ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥٦﴾

Artinya : ‘‘Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya’’.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN PADA KELOMPOK SIMPAN PINJAM KHUSUS PEREMPUAN DI DESA DUKUHSETI KECAMATAN DUKUHSETI KABUPATEN PATI TAHUN 2015

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang dikeluarkan pada tahun 2007, PNPM dicanangkan guna mengurangi kemiskinan. Penelitian ini ingin mengetahui implementasi PNPM pada kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) di desa Dukuhseti pada tahun 2015, dan bagaimana peran SPP di desa Dukuhseti ditinjau dari segi ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui teknik analisis deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian dari implementasi PNPM mandiri pedesaan pada kelompok SPP di desa dukuhseti adalah 1) Jumlah anggota penerima yang tepat sasaran atau sesuai dengan daftar masyarakat miskin Dinas sosial sebanyak 10 orang anggota, 2) Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) bertujuan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin, hal ini dapat diketahui bahwa sebelum ada SPP pendapatan anggota sebesar Rp. 50.000 dan setelah ada SPP pendapatan anggota sebesar Rp. 75.000, 3) SPP memiliki prosedur pengajuan pinjaman sampai dengan pencairan, 4). Besar dana SPP yang digulirkan di desa Dukuhseti pada tahun 2015 sebesar Rp. 339.250.000 untuk 20 kelompok.

Peran SPP di desa Dukuhseti belum bisa dirasakan masyarakat secara menyeluruh, hal tersebut dikarenakan belum optimalnya prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat serta minimnya pengawasan dan pembinaan dari UPK. Dasar pengharaman riba adalah kedzaliman dan ketidakadilan dalam pinjaman. Adapun hasil pengamatan peneliti dalam penelitian ini bahwasanya masyarakat penerima manfaat pinjaman dana SPP

mengatakan tidak merasa keberatan dengan pembebanan bunga sebesar 1.5 persen dari pinjaman SPP.

Kata Kunci: Pemberdayaan Perempuan, Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut :

a. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	...’	apostrof
ي	ya	y	ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathah	a	a
ـِ	kasrah	i	i
ـُ	dhammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـِ	fathah dan ya	ai	a dan i
ـَـِو	fathah dan wau	au	a dan u

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...ا...أ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...ي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh : قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

d. Ta Marbutah

Transliterasinya menggunakan :

1. Ta Marbutah hidup, transliterasinya adaah / t /

Contohnya : رَوْضَةٌ : rauḍatu

2. Ta Marbutah mati, transliterasinya adalah / h /

Contohnya : رَوْضَةٌ : rauḍah

3. Ta marbutah yang diikuti kata sandang al

Contohnya : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

e. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contohnya : رَبَّانَا : rabbanā

f. Kata Sandang

Transliterasi kata sandang dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Kata sandang syamsiyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan huruf bunyinya

Contohnya : الشفاء : asy-syifā'

2. Kata sandang qamariyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya huruf / l /.

Contohnya : القلم : al-qalamu

g. Hamzah

Diyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تأخذون - ta'khuzūna

النوء - an-nau'u

شيئ - syai'un

إن - inna

أمرت - umirtu

أكل - akala

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik itu fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contohnya :

وَأَنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diataranya : huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - Wa mā Muhammadun illā rasūl

إن أول بيت وضع للناس - Inna awwala baitin wuḍ'ā linnāsi

الذي بكة مباركة lallaẓī bi Bakkata mubārakatan

شهر رمضان الذي أنزل فيه - Syahru Ramaḍāna al- lallaẓī unzila fihi

القرآن	al-Qur'ānu
	Syahru Ramaḍāna al- lallaḥī unzila fīhil Qur'ānu
ولقد راه بالأفق الميين	- Wa laqad ra'āhu bi al-ufuq al-mubīnī Wa laqad ra'āhu bi al-ufuqil mubīnī
الحمد لله رب العالمين	- Alḥamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn Alḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب	- Naṣrun minallāhi wa faṭḥun qārib
لله الأمر جميعا	- Lillāhi al-amru jamī'an Lillāhil amru jamī'an
والله بكل شيء عليم	- Wallāhu bikulli syai'in 'alīm

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan ridhonya, yang mengajari kita ilmu dan mengajari manusia atas apa-apa yang tidak diketahui, dengan pemberian akal yang sempurna. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Saw, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Atas selesainya penyusunan skripsi ini, dengan judul “Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Pada Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan Di Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tahun 2015” penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Dr. H.Imam Yahya, M.Ag.
3. Ketua Jurusan Ekonomi Islam, Ahmad Furqon, LC., MA.,
,Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam, Mohammad Nadzir, S.HI, MSI yang telah mengijinkan pembahasan skripsi ini.
4. Ibu Heny Yuningrum, SE., M.Si., dan Bapak Drs, Saekhu, M.H, selaku pembimbing dalam penyelesaian skripsi ini, yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing, mengarahkan dan memberikan semangat penulis dalam penyusunan skripsi, hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Segenap dosen, staf pengajar dan pegawai di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah membekali penulis berbagai pengetahuan dan pengalaman selama di bangku perkuliahan.
6. Ibunda Siti Salmah dan Ayahanda Sholihul Huda beserta saudara-saudaraku, kakak dan adik keluargaku tercinta, yang tiada henti-

hentinya memberikan dukungan disetiap langkahku, dengan segala pengorbanan dan kasih sayangnya serta untaian do'a yang tiada hentinya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

7. Pengurus PNPM kecamatan Dukuhseti serta Ibu-ibu anggota Simpan Pinjam Khusus Perempuan desa Dukuhseti, terimakasih telah meluangkan waktunya.
8. Segenap sahabat, teman, kenalan, dan semua yang pernah hadir dalam duniaku. Terima kasih atas kehadiran kalianlah saya belajar bersabar, ikhlas, dan berusaha. Sahabat kontrakan hijau, Cuyung, pipeh, maya, una, pathi, dewi . Sahabat seprodi (EIE), abidah, karim, azizah . Warga posko 13, dieza, mama, mb muhim, resti, mas ighfir.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan yang telah dilakukan. Penulis menyadari tentulah masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, oleh karenanya kritik dan saran konstruktif amat penulis nantikan. Semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bermanfaat. Amin

Semarang, 21 Juni 2017

Siti Faiqotun Nikmah
Nim. 132411176

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA PEMBIMBING.....	iv
MOTO.....	v
ABSTRAK.....	v
TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Penelitian Terdahulu.....	10
F. Metodologi Penelitian.....	14
BAB II : LANDASAN TEORI.....	19
A. Teori Kemiskinan.....	19
1. Konsep Kemiskinan.....	19
2. Kriteria Penduduk Miskinan.....	22

3. Pandangan Islam Tentang Kemiskinan.....	26
B. Teori Pemberdayaan.....	33
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	33
2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat.....	35
3. Konsep Islam Tentang Pemberdayaan.....	37
C. Teori Pinjaman	39
1. Pengertian Pinjaman.....	40
2. Dasar Hukum Pinjaman.....	42
3. Rukun dan Syarat Pinjaman.....	45

**BAB III : GAMBARAN UMUM PROGRAM SPP PNPM MANDIRI
PEDESAAN DI DESA DUKUHSETI KECAMATAN DUKUHSETI
KABUPATEN PATI**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
B. Profil Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Pedesaan.....	50
C. Pedoman Penerapan Simpan Pinjam Khusus Perempuan.....	55
D. Standar Operasional SPP Kecamatan Dukuhseti..	73

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN.....	81
A. Implementasi SPP PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Dukuhseti Tahun 2015.....	81
B. Peranan SPP PNPM Mandiri Pedesaan di desa Dukuhseti.....	95

BAB V : PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Rekomendasi.....	101
C. Penutup.....	101

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi SPP Tahun 2015
Tabel 1.2	Jumlah Penerima Pinjaman
Tabel 3.1	Jumlah Penduduk dan KK desa Dukuhseti Tahun 2015
Tabel 3.2	Mata Pencaharian Penduduk Desa Dukuhseti Tahun 2015
Tabel 3.3	Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
Tabel 3.4	Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat
Tabel 3.5	Kategorisasi Tingkat Perkembangan Kelompok
Tabel 4.1	Jumlah Penerima Pinjaman
Tabel 4.2	Modal Awal Perguliran SPP
Tabel 4.3	Penyaluran SPP Tahun 2015
Tabel 4.4	Daftar Penerima Manfaat dan Angsuran SSP Perguliran Desa Dukuhseti Tahun 2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan ketidak mampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak .¹ Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus di Indonesia. Masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan kini masih hadir di tengah-tengah kita. Gejala kemiskinan semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi bangsa Indonesia.² Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Sedangkan persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan. Upaya untuk menanggulangnya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan

¹Edi Suharto, *Membangun masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014, Cetakan Kelima, hal 13.

²Ibid. 134

antara aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan.³

Kebijakan-kebijakan yang telah dicanangkan pemerintah misalnya, Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai dampak dari kenaikan BBM. BLT merupakan bantuan yang diperuntukan untuk rumah tangga miskin, pada realisasinya sebagian masyarakat menjadikannya sebagai ajang untuk mendapatkan dana gratis. Banyak masyarakat yang tergolong mampu turut serta dalam proses mendapatkan dana gratis tersebut. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa, dari kebijakan ini lahir orang miskin baru yang pada dasarnya mereka tergolong mampu. Budaya malas yang telah lama melekat pada masyarakat kita akhirnya menguat. Masyarakat menganggap bahwa pemerintah telah menjamin kehidupan mereka dalam bentuk bantuan langsung tunai tersebut. Sehingga mereka enggan untuk bekerja. Kemudian kebijakan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN), merupakan program penanggulangan kemiskinan yang berupa subsidi pangan yang diperuntukkan bagi keluarga miskin untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin.⁴ Program raskin ini bersifat statis bukan program penanggulangan kemiskinan yang dinamis. Kebijakan-

³Departemen dalam Negeri Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, *Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan*, 2008, hal 2.

⁴ Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), *Program Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*,

kebijakan tersebut dianggap belum memihak kepada masyarakat miskin, kebijakan tersebut dianggap membuat keadaan masyarakat miskin semakin tergantung kepada pemerintah. Masyarakat lapisan bawah hanya sebagai obyek dan suplemen pembangunan saja.⁵

Oleh karena itu kemiskinan perlu ditangani secara terpadu, terencana dan berkesinambungan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan salah satu program pembangunan yang berfungsi untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja ditingkat pedesaan dan perkotaan yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah pendekatan yang memberikan kesempatan, wewenang yang lebih besar kepada masyarakat terutama masyarakat lokal untuk mengelola proses pembangunan.⁶

Pembangunan pedesaan sangat diperlukan untuk Indonesia karena sebagian besar penduduk Indonesia, yaitu ±60% mereka tinggal di pedesaan. Pembangunan pedesaan bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai hambatan dalam kehidupan sosial-ekonomi, seperti kurang pengetahuan dan

⁵ Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan pendekatan partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, Edisi Pertama, hal. 5.

⁶ Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, Cetakan 1, hal. 69.

keterampilan, kurang kesempatan kerja, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada umumnya penduduk wilayah pedesaan miskin.⁷

Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri sejak tahun 2007 yang terdiri dari PNPM mandiri perdesaan, PNPM mandiri perkotaan, serta PNPM mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM mandiri perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Khusus untuk pengembangan PNPM mandiri perdesaan dilakukan dengan dasar Surat Keputusan Menkesra No 25/Kep/Menko/Kesra/VII 2007 tanggal 30 juli 2007, di tindak lanjuti dengan kebijakan ditingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota.⁸

Pendekatan PNPM mandiri perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.

⁷ Johara T. Jaya Dinata dan I.G.P. Pramandika, *Pembangunan Desa dalam Perencanaan*, Bandung: ITB, 2006, h. 1

⁸ Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, *Petunjuk Teknis Operasional*, hal. 2

Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumberdaya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah:

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya.
2. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif.
3. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat.
5. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Untuk mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK).⁹

⁹Ibid

Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) adalah salah satu program dari PNPM Mpd. Sebagai alternatif pemecahan permasalahan kemiskinan di pedesaan program SPP memberikan permodalan bagi kelompok perempuan yang menjalankan kegiatan simpan pinjam dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah dari pada bank, hal tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat terutama kaum perempuan untuk dapat meningkatkan taraf hidup dengan mengembangkan usaha yang dikelola.

Dari hasil wawancara peneliti dengan pengurus PNPM mandiri pedesaan kecamatan Dukuhseti, program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) di desa Dukuhseti mulai beroperasi sejak tahun 2009 sampai sekarang.

Adapun modal awal dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), tahun 2009 Rp. 500.000.000.00, tahun 2010 Rp. 500.000.000.00, tahun 2011 Rp. 426.000.000.00, tahun 2012 Rp. 217.500.000.00. Total modal awal SPP perguliran Rp. 1.643.500.000.00 dan telah berkembang menjadi Rp. 3.895.500.000 yang disalurkan ke 137 kelurahan di 12 desa di Dukuhseti yang tersebar menjadi 222 kelompok dengan jumlah anggota \pm 2.083 orang. Realisasi penyalurannya sebagai berikut:

TABEL 1.1**Realisasi Penyaluran SPP Tahun 2015**

NO	BULAN	KELOMPOK	PERGULIRAN
1	Januari	12	Rp. 149.000.000
2	Februari	18	Rp. 330.500.000
3	Maret	13	Rp. 263.500.000
4	April	28	Rp. 488.000.000
5	Mei	9	Rp. 162.000.000
6	Juni	37	Rp. 621.000.000
7	Juli	34	Rp. 604.500.000
8	Agustus	6	Rp. 116.500.000
9	September	13	Rp. 243.000.000
10	Oktober	20	Rp. 327.500.000
11	November	9	Rp. 186.500.000
12	Desember	23	Rp. 401.000.000
TOTAL		222	Rp. 3.895.500.000

Sumber: Laporan Keungan Dana bergulir dari Kecamatan Dukuhseti

Secara umum perguliran SPP di desa Dukuhseti berjalan dengan tingkat jasa 1,5% di UPK dan 0,3% di tabungan Kelompok. Sampai dengan akhir desember 2015 menunjukkan bahwa tingkat pengembalian pinjaman kelompok sebesar 98,3%. Dengan kata lain masih ada tunggakan sebesar 1,7% atau sebesar Rp. 207.353.000,00.

Selain itu realisasi SPP di desa dukuhseti ada perbedaan nama peserta penerima dana bergulir dengan daftar nama penduduk kelompok miskin yang ada di Dinas social. Hal ini terlihat di tabel 1.2.

TABEL 1.2

Jumlah Penerima Pinjaman

Kelompok	Jumlah Sesuai Dinas Sosial		Jumlah Tidak Sesuai Dinas Sosial		Total
	Jumlah	%	Jumlah	%	
Bugenvil	3	33	6	66	9
Rajawali Indah	3	33	6	66	9
Merpati I	2	20	8	80	10
Merpati II	2	20	8	80	10
Total					38

Sumber: Laporan SPP dari Kecamatan Dukuhseti

Dari tabel 1.2 terlihat bahwa dari setiap kelompok yang menerima dana SPP tidak tepat sasaran sebesar 66% - 88% sedangkan yang tepat sasaran 20% - 33%. Hal ini membuktikan bahwa saat pengguliran dana dari PNPM ada kesalahan tidak tepat sasaran dalam penyalurannya. Tidak Sesuai dari laporan

pendataan kelompok fakir miskin dari Dinas Sosial Kabupaten Pati.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Pada kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) di Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tahun 2015.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri pedesaan pada kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) di desa Dukuhseti kecamatan Dukuhseti kabupaten Pati tahun 2015?
2. Bagaimana peranan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri pedesaan pada kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) di tinjau dari segi ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan pada kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) di desa Dukuhseti kabupaten Pati tahun 2015.
2. Mengetahui peranan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri Pedesaan pada kelompok Simpan

Pinjam Khusus Perempuan (SPP) di tinjau dari segi ekonomi Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kalangan mahasiswa umumnya dan mahasiswa jurusan ilmu ekonomi pada khususnya sebagai bahan referensi yang tertarik dalam bidang kajian ini.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran serta bahan evaluasi pelaksanaan PNPM mandiri pedesaan pemerintah daerah khususnya pemerintah kecamatan, desa dan masyarakat Dukuhteti.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh :

Muhammad Dzakir Penelitian ini berjudul, ”Peranan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Bangkinang Seberang Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (Field Research) di PNPM mandiri pedesaan kecamatan Bangkinang Seberang kabupaten Kampar. Analisis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif.

Adapun hasil dari penelitian ini, bahwa PNPM mandiri pedesaan kecamatan bangking seberang mempunyai peranan yang penting terhadap peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah di kecamatan Bangking Seberang. Program yang berperan langsung dalam peningkatan UMKM ini adalah Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP). Hal ini terbukti, 45 orang atau 83% responden dari angket yang disebarkan menyatakan bahwa program PNPM mandiri pedesaan yang dicanangkan oleh pemerintahan sangat baik terutama dalam hal peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh PNPM Mandiri Pedesaan adalah karena kurangnya keaktifan masyarakat dalam mengikuti Musyawarah Anatar Desa (MAD), karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan pinjaman dari PNPM Mandiri pedesaan, dan karena masih belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh PNPM Mandiri Pedesaan. Penelitian tersebut beda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.¹⁰

Penelitian oleh Rini Puji Lestari dan Indah Murti, “Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) (Studi Kasus Di Desa Sedengan Mijen, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif. Pengumpulan data

¹⁰Muhammad Dzakhir, “Peranan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kecamatan Bangkinang Seberang Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, Riau: Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari’ah Dan Ilmu Hukum *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011, t.d.

penelitian dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui teknik analisis deskriptif kualitatif dengan proses pengumpulan, reduksi, penyajian dan verifikasi data. Hasil dari penelitian yang dilakukan tentang efektivitas. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa telah bisa dikatakan efektif. Meskipun masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya.¹¹

Penelitian oleh Sutinah, "Evaluasi Kegiatan Pinjaman Bergulir Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan (PNPM-Mpd) Di Kota Palembang (Studi Kasus Di Tiga Kelurahan)", Jurnal Administrasi Publik , Volume 16 No. 01 Januari 2016, ISSN: 1978-4465. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan kelompok peminjam di Kelurahan 13 Ilir, 14 Ilir dan 23 Ilir.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di kelurahan 13 Ilir dan 14 Ilir telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik, perkembangan jumlah pengguna kredit yang cenderung meningkat dan rendahnya kredit macet. Hal ini menunjukkan indikator keberhasilan pemberian kredit, untuk membantu

¹¹Rini Puji Lestari dan Indah Murti, Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) (Studi Kasus Di Desa Sedengan Mijen, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo

mengembangkan usaha dan lainnya, hal ini sebagai bukti kepercayaan masyarakat dalam menggunakan kredit. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir sangat tergantung pada LKM, UPK, masyarakat dan tokoh masyarakat. Di Kelurahan 13 Ilir dan 1 4 Ilir pelaku memiliki kepedulian untuk menagih peminjam dan mendatangi peminjam yang macet. Berbeda di Kelurahan 23 Ilir, kemacetan terus bertambah dan pelaku kurang menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Pemberian pinjaman bergulir di PNPM tidak efektif, karena tidak seluruhnya pinjaman untuk keperluan kegiatan usaha, sebagian besar digunakan peminjam untuk menanggulagi keperluan pada saat dana cair.¹²

Dari uraian diatas dapat peneliti simpulkan bahwa dari beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu ada yang menyatakan bahwa penerapan PNPM mandiri pedesaan bisa dikatakan efektif di satu daerah dan peneliti lain dilain daerah menemukan bahwa penerapan PNPM mandiri pedesaan masih banyak ditemukan kendala-kendala. Disini peneliti akan meneliti implementasi PNPM mandiri pedesaan yang ada di desa Dukuhseti. Dimana implementasi PNPM mandiri pedesaan di desa Dukuhseti Kabupaten Pati belum pernah diteliti.

¹² Sutinah, Evaluasi Kegiatan Pinjaman Bergulir Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan (PNPM-Mpd) Di Kota Palembang (Studi Kasus Di Tiga Kelurahan), *Jurnal Administrasi Publik* , Volume 16 No. 01, 2016, hal. 68

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Penelitian merupakan rangkaian kegiatan pemecahan permasalahan akan tetapi hasil penelitian tidak langsung memecahkan permasalahan. Tugas penelitian adalah mencari alternatif penjelasan atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dapat digunakan sebagai bagian informasi untuk pemecahan masalah. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif.¹³ John Creswel, mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut, peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan atau informan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi yang disampaikan informan kemudian dikumpulkan. Informasi tersebut biasanya berupa kata atau teks. Data yang berupa kata-kata atau teks tersebut kemudian dianalisis. Hasil analisis itu dapat berupa penggambaran atau deskripsi atau dapat pula dalam bentuk tema - tema. Dari data- data tersebut peneliti membuat interpretasi untuk mengungkap arti yang terdalam.¹⁴

¹³Muchammad Fauzi, *Metode Penelitian Kuantitatif Sebuah Pengantar*, Semarang: Walisongo Press, 2009, Cetakan 1, hal. 18.

¹⁴Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012, Cetakan ke-3, hal. 11

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengungkap secara mendalam tentang implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri pedesaan pada kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) di desa Dukuhseti kecamatan Dukuhseti kabupaten Pati tahun 2015.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer.

Sumber data primer adalah data atau informasi dari sumber pertama, biasanya kita sebut dengan responden. Data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan menggunakan metode wawancara.¹⁵ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dan menyebar angket kuisisioner kepada responden, yaitu anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tahun 2015 di desa dukuhseti.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti.¹⁶ Data ini berupa studi kepustakaan yang berupa teori-teori, buku

¹⁵Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, Cetakan Pertama, hal 16

¹⁶Ibid,hal 17

literatur, ataupun catatan yang berhubungan dengan masalah yang berhubungan dengan implementasi program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan pada kelompok pinjaman bergulir perspektif ekonomi Islam di desa dukuhseti kecamatan dukuhseti kabupaten Pati tahun 2015.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁷ Adapun dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan cara:

a. Observasi

Merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Istilah observasi diturunkan dari bahasa latin yang berarti “*malihat*” dan “*memerhatikan*”. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.¹⁸

Untuk mendapatkan data yang akurat, maka peneliti menggunakan observasi dalam mengumpulkan data. Dimana

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016, Cetakan ke-23, hal. 224.

¹⁸Ibid

peneliti mengamati secara langsung proses kegiatan SPP yang ada di desa Dukuhseti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu. Terdapat dua pihak dengan kedudukan yang berbeda dalam proses wawancara. Pihak pertama, berfungsi sebagai penanya, disebut juga sebagai *interviewer*, sedang pihak kedua berfungsi sebagai pemberi informasi (*Information supplyer*), interviewer atau informan. Interviewer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta keterangan atau penjelasan, sambil menilai jawaban-jawabannya.¹⁹

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan pengelola PNPM mandiri pedesaan kecamatan Dukuhseti serta masyarakat yang menjadi nasabah PNPM mandiri pedesaan guna melengkapi data yang diperlukan tentang implementasi program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan pada kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) di desa Dukuhseti kabupaten Pati tahun 2015.

c. Dokumentasi

Kata dokumen berasal berasal dari bahasa latin yaitu *docere*, berarti mengajar. Dokumen merupakan catatan

¹⁹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012, hlm. 131.

peristiwa yang telah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen.²⁰ Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non insani. Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. Peneliti menggali data dari pengelola PNPM mandiri pedesaan guna mendukung penelitian tentang implementasi program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan pada Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) di desa Dukuhseti kabupaten Pati tahun 2015.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif, yakni setelah semua data telah berhasil peneliti kumpulkan, maka peneliti menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.²¹

²⁰ Sugiyono, Metode Penelitian..., h. 226

²¹ Ibid

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Kemiskinan

1. Konsep Kemiskinan

Definisi kemiskinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum.¹

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang mengalami kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Menurut badan perencanaan pembangunan Nasional menjelaskan bahwa kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Menurut Chambers, dikutip oleh Nasikun, bahwa kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*poor*), 2) Ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan

¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hal 940

(*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.²

Nasikun menyoroti beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:

- a. *Policy Induces Processes*: proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan (*induced of policy*) diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi realitanya justru melestarikan.
- b. *Socio-economic Dualism*: negara eks koloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.
- c. *Population Growth*: perspektif yang didasari pada teori Malthus bahwa penambahan penduduk seperti deret ukur sedang penambahan pangan seperti deret hitung.
- d. *Recources Management and the Environment*: adanya unsur mismanagement sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.
- e. *Natural Cycles and Proseses*: kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal di lahan kritis, di mana lahan ini jika turun hujan akan terjadi banjir tetapi jika musim kemarau akan kekurangan air, sehingga tidak

²Mudrajat Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan kebijakan*, Yogyakarta: UPP AMP-YKPN, 2003, hal. 107.

memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus menerus.

- f. *The Marginalization of woman*: peminggiran kaum perempuan karena perempuan masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang diberikan lebih rendah dari laki-laki.
- g. *Cultural and Ethnic Factors*: bekerjanya factor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya, pola hidup konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan.³

Ada dua jenis kriteria dalam mengukur kemiskinan, yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan Absolut.

Pertama, kemiskinan relatif ditentukan berdasarkan ketidak mampuan untuk mencapai standar kehidupan yang ditetapkan masyarakat setempat. Kemiskinan relatif merupakan suatu kondisi dimana individu atau kelompok orang berada dalam tingkatan kekurangan dibandingkan dengan standar kehidupan umum (disebut sebagai garis kemiskinan) yang layak berlaku di masyarakat. Mereka yang berada di bawah standar

³Dimas, Pemberdayaan kaum Dhu'afa Melalui Zakat, *Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, Volume 12 No. 2 Tahun 2012, hal. 126.

penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Dengan demikian penentuannya bersifat subyektif.⁴

Kedua kemiskinan absolut, kemiskinan absolut ditentukan berdasarkan ketidak mampuan untuk mencukupi kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok minimum. Seseorang disebut miskin secara absolut apabila tingkat pendapatannya tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup minimum (*basic need*) seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. BPS menggunakan pendekatan nilai kebutuhan dasar atau kebutuhan minimum tersebut diterjemahkan dalam ukuran financial yaitu dalam nilai uang. Garis kemiskinan absolut penting digunakan untuk menilai dampak dari suatu kebijakan dalam mengurangi kemiskinan.⁵

2. Kriteria Penduduk Miskin

Emil Salim mengungkapkan terdapat 4 ciri penduduk yang tergolong miskin di daerah pedesaan. Keempat ciri tersebut antara lain :

1. Tidak memiliki faktor produksi sendiri (lahan, modal, dan ketrampilan)

⁴Sri Hery Susilowati, Pendekatan Skala Ekuivalensi Untuk mengukur Kemiskinan, *Jurnal Penelitian Agro Ekonomi*, Volume 28, No 2, 2010, hal. 92

⁵Ibid

2. Tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh penguasaan terhadap faktor produksi dengan kekuatan sendiri.
3. Tingkat pendidikan rendah.
4. Kebanyakan tidak memiliki lahan, walaupun ada umumnya sempit, sebagian besar bermata pencaharian sebagai buruh tani atau pekerja kasar diluar pertanian .⁶

Departemen Dalam Negeri dalam penelitiannya untuk menentukan lokasi kecamatan miskin menggunakan garis batas kemiskinan atas dasar pendapatan untuk kebutuhan hidup yang penilainya didasarkan pada harga 9 bahan pokok di pasar setempat, kemudian diklasifikasikan ke dalam 4 kelas kemiskinan yaitu:

1. Miskin sekali, jika pendapatan perkapita kurang dari 75% kebutuhan hidup minimum.
2. Miskin, Jika pendapatan perkapita antara 75%-125%.
3. Hampir miskin, jika pendapatan perkapita terletak antara 125%-200%.
4. Tidak miskin, jika pendapatan per kapita lebih dari 200% kebutuhan minimum.⁷

⁶L. Mimbar, Peran Badan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMD) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat, *Jurnal Transformasi* , Volume 11, Nomor 1, 2015, hal. 6.

⁷Ibid. PTO,hal,13

Pada tahun 2000 BPS melakukan Studi Penentuan Kriteria Penduduk Miskin (SPKPM 2000) untuk mengetahui karakteristik-karakteristik rumah tangga yang mampu mencirikan kemiskinan secara konseptual (pendekatan kebutuhan dasar/garis kemiskinan). Hal ini menjadi sangat penting karena pengukuran makro (*basic needs*) tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi rumah tangga/penduduk miskin di lapangan. Informasi ini berguna untuk penentuan sasaran rumah tangga program pengentasan kemiskinan.

Dari hasil SPKM 2000 tersebut diperoleh 8 variabel yang dianggap layak untuk penentuan rumah tangga miskin di lapangan, yaitu:

1. Luas Lantai Perkapita ($\leq 8 \text{ m}^2$)
2. Jenis Lantai (Tanah)
3. Air Minum/ketersediaan air Bersih (Air hujan/sumur tidak terlindungi)
4. Jenis Jamban/WC (Tidak ada)
5. Kepemilikan Asset (tidak punya asset)
6. Pendapatan (total pendapatan perbulan ≤ 350.000)
7. Pengeluaran (persentase pengeluaran untuk makan 80 persen +)
8. Konsumsi Lauk Pauk (Tidak ada/ada, tapi tidak bervariasi)

Kedelapan variabel tersebut diperoleh dengan menggunakan metode *stepwise logistic regression* dan

misklasifikasi yang dihasilkan sekitar 17 persen. Hasil analisis deskriptif dan *uji-chi-square* juga menunjukkan bahwa kedelapan variabel terpilih tersebut sangat terkait dengan fenomena kemiskinan dengan tingkat kepercayaan sekitar 99 persen. Skor batas yang digunakan adalah 5 (lima) yang didasarkan atas modus total skor dari domain rumah tangga miskin secara konseptual. Dengan demikian apabila suatu rumah tangga mempunyai minimal 5 (lima) ciri miskin maka rumah tangga tersebut digolongkan sebagai rumah tangga miskin.⁸

Penentuan kategori rumah tangga miskin haruslah sangat hati-hati. Karena berhubungan langsung dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan itu sendiri. Kebijakan penanggulangan kemiskinan dikatakan efektif ketika jumlah rumah tangga miskin berkurang, dan sebaliknya. Salah satu faktor kegagalan sebuah kebijakan adalah ketika dalam penyalurannya tidak tepat sasaran.

Dari beberapa indikator rumah tangga miskin hasil Studi Penentuan Kriteria Penduduk Miskin oleh BPS yang telah dipaparkan diatas, telah jelas kategori rumah tangga miskin, maka dalam hal pendataan rumah tangga miskin dari bawah

⁸*Analisis dan Penghitungan Tingkat kemiskinan Tahun 2008*, Jakarta: Badan Pusat Statistika, 2008, hal. 15.

tingkat RT bisa mengacu pada 8 variabel diatas sehingga tidak salah dalam menentukan rumah tangga miskin.

3. Pandangan Islam Tentang Kemiskinan

Al-qur'an sebagai pedoman ajaran agama Islam, tidak ada satu pun ayat di dalamnya yang memuji kemiskinan. Demikian pula Hadis nabi Saw, tidak ada yang shahih mengenai hal ini. Adapun hadis-hadis yang memuji zuhud terhadap dunia, tidak berarti memuji kemiskinan. Masyarakat kita seringkali salah kaprah dalam mengartikan kata zuhud. Zuhud diartikan tidak bolehnya memiliki harta atau menjauhi harta, yang sebenarnya zuhud adalah memiliki harta lalu menyimpan harta ini di tangannya bukan di hatinya⁹.

Islam memandang kaya itu sebagai nikmat dari Allah Swt yang patut disyukuri, dan memandang miskin sebagai problem bahkan musibah yang harus dijauhi. Oleh karena itu, Islam membuat berbagai solusi untuk mengentaskannya. Sebagaimana Allah Swt telah memberikan kekayaan kepada Rosul-Nya Saw, di dalam surah Ad-Duha : 8

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ

⁹ Yusuf Qardhawi, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Terjemahan, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2010, Cetakan Pertama, hal, 19

Artinya: “ Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan”.

Allah juga menjadikan pemberian harta yang disegerakan itu sebagai pahala dari-Nya bagi orang-orang mukmin. Sebagaimana Firman Allah (Q.S. Nuh: 10-12)

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ السَّمَاءَ

عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿١١﴾ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَنْبِتْ لَكُمْ جَنَّاتٍ

وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿١٢﴾

Artinya : “Maka aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan Mengadakan untukmu kebun-kebun dan Mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai”.(Q.S. Nuh:10-12).

Demikian pula hadis rosul memandang kemiskinan itu bahaya yang sangat mengkhawatirkan bagi pribadi dan masyarakat, aqidah dan keimanan, akhlaq dan prilaku, pemikiran dan budaya, dan keluarga juga bangsa.

1. Kemiskinan bahaya bagi aqidah

Tidak diragukan lagi bahwa kemiskinan itu bahaya besar bagi aqidah, apalagi miskin yang melarat lalu bertetangga dengan orang kaya yang tidak baik. Demikian

pula jika yang miskin ini seorang pekerja yang ulet sedang yang kaya seorang yang duduk saja di rumah. Dalam keadaan seperti itu kemiskinan akan menjadi penyebab utama keraguan akan kebijaksanaan aturan Allah Swt. Bagi kehidupan, juga keraguan akan keadilan-Nya dalam hal rezeki.¹⁰ Hal tersebut didukung dengan hadis Rosul:

كَمَا دَانَ الْفَقْرَ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا (روه ابو داود)

“Kefakiran (kemiskinan) itu nyaris menyebabkan kekafiran. (HR. Abu Dawud).

2. Kemiskinan Berbahaya Bagi Akhlaq dan Perilaku

Jika kemiskinan berbahaya bagi aqidah dan keimanan, maka tidak kalah bahayanya bagi akhlaq dan perilaku manusia. Sebab kemiskinan itu keletihannya banyak mendorong pada perilaku atau perbuatan tidak terpuji. Karena itu banyak orang berkata : Bunyi perut itu lebih dahsyat daripada bunyi hati”. Bahkan lebih buruk dari ini, kemiskinan itu menimbulkan keragu-raguan atas nilai-nilai akhlaq berikut keseimbangan ukurannya sebagaimana pula meragukan nilai-nilai agama.¹¹ Rasulullah Saw, telah mengingatkan betapa bahayanya kemiskinan bagi seseorang berikut pengaruhnya pada perilaku orang tersebut, beliau bersabda:

¹⁰ Ibid.hal, 20

¹¹ Ibid.

خُدُوا الْعِطَاءَ مَا دَامَ عِطَاءً فَادْأَصَارَ رِشْوَةً عَلَى الَّذِينَ فَلَا
تَأْخُذُوهُ وَ لَسْتُمْ بِأَرْكَانِهِ تَمْنَعُكُمْ الْحَاجَةُ
(رواه ابو تعليم)

Aritinya ; “ Ambilah pemberian itu selama merupakan pemberian. Maka jika ia merupakan suap yang mengalahkan agama, janganlah diambil. Namun kalian bukan orang-orang yang kuat menjauhi suap tersebut, yang menghambat kalian tidak kuat menjauhinya adalah butuh dan fakir.

3. Kemiskinan Berbahaya pada Pikiran

Hidup miskin juga berbahaya pada pikiran seseorang. Orang miskin yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok bagi diri dan keluarganya, biasanya tidak bisa berpikir teliti. Karena memikirkan keadaan keluarganya.¹²

Islam menolak pendapat kaum Fatalisme (*jabbariyin*) bahwa miskin dan kaya adalah ketetapan atau takdir Allah yang tidak bisa dihindari. Artinya Islam menolak bahwa seseorang menjadi kaya sudah kehendak allah, dan seseorang menjadi miskinpun merupakan kehendak allah. Sedangkan kehendak-Nya ini mesti diterima

¹² Ibid,hal,21

dengan rela, maka siapa pun orangnya mesti rela dengan kepastian-Nya, jangan berupaya mengubah kepastian ini.¹³

Pandangan tersebut telah menganggap ada rintangan besar untuk melakukan berbagai upaya memperbaiki takdir buruk, menyeimbangkan ketimpangan, menegakkan keadilan, atau membangun solidaritas manusia sesuai harapan.¹⁴

Beberapa kaidah Islam mengatakan bahwa setiap kesulitan di dunia ini ada solusinya. Kemudian setiap penyakit ada obatnya, karena yang menciptakan penyakit ini juga menciptakan obatnya. Demikian pula yang menghendaki sakit juga menghendaki kesembuhan, maka yang sakit itu berdasarkan takdir Allah, yang sembuh juga takdir Allah pula. Senada dengan hal ini takdir lapar juga bisa dihindari dengan takdir makan, dan takdir haus bisa dihindari dengan takdir minum. Suatu ketika Nabi ditanya tentang obat-obatan yang digunakan para sahabat dan suatu kekhawatiran yang dihindari mereka: “Apakah cara itu sudah menolak suatu takdir Allah pula.” Oleh karena itu jika kemiskinan ini merupakan penyakit, maka Allah pun telah menciptakan obat bagi kemiskinan ini, Jika kemiskinan ini

¹³ Ibid.hal. 23

merupakan takdir dari Allah maka upaya menghindari takdir miskin ini pun sebagai takdir-Nya pula.¹⁵

Mengenai hadits-hadits yang menganjurkan qana'ah atau rela dengan pembagian Allah, bukan berarti orang miskin itu harus rela dengan penghidupan rendah, tidak berusaha kaya atau tidak hidup bahagia seperti orang kaya. Karena Kaya dan miskin merupakan sesuatu yang dapat diikhtari.

Rasulullah selalu memohon kaya kepada Allah Swt, seperti halnya beliau memohon ketakwaan.

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ-اَسْأَلُكَ الْهُدٰى وَالتَّقٰى وَالعِفَافَ وَالعِنْيَ (روه مسلم و بخرى
وترمذى وابن مجه)

“ Ya Allah, sesungguhnya aku mohon pada-Mu petunjuk, ketakwaan, kesucian (jauh dari hal-hal tidak baik) dan kecukupan.”(HR. Muslim, Tirmidzi, dan Ibnu Majjah).

Demikian pula beliau berdoa bagi sahabat sekaligus pembantunya, Anas r.a. dengan doanya: "Ya Allah perbanyaklah ia (anas) hartanya.”¹⁶

Islam menolak solusi pengentasan kemiskinan hanya dengan memberi secara sukarela atau bersifat konsumtif saja. Karena membiarkan fakir miskin dibawah belas kasihan mereka tanpa ada langkah lain hanyalah tindakan menelantarkan fakir miskin itu sendiri. Sebagaimana

¹⁵ Ibid.hal 23

¹⁶Ibid. hal, 25.

fenomena yang terjadi pada masyarakat kita, bantuan tunai dari pemerintah menjadikan mereka bermalas-malasan karena mereka menggantungkan kebutuhannya pada bantuan tersebut. Dimana mereka tidak perlu memeras keringat untuk mendapatkan uang. Sayogyanya fakir miskin diberdayakan dengan memfasilitasinya. Solusi yang ditawarkan Islam dalam mengentaskan kemiskinan adalah: bekerja. Hal ini Berdasarkan firman Allah yang terdapat pada surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ

وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ

تَفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (Q.S Al-Jumu'ah: 10).

Orang yang berusaha kesana kemari untuk mencari karunia Allah, ia layak mendapatkannya. Sedang orang yang duduk saja di rumahnya ia juga layak jauh dari karunianya.

Bekerja adalah senjata pertama guna memerangi kemiskinan. Bekerja juga upaya pertama untuk mendapatkan kekayaan, demikian pula sebagai unsur pertama

memakmurkan dunia yang dititipkan Allah kepada manusia yang diperintahkan untuk memakmurkannya. Dengan bekerja seorang muslim dapat mencukupi keluarganya. Pemerintah hendaknya memfasilitasi masyarakat untuk bekerja dengan memberikan pinjaman modal semisal.¹⁷

B. Teori Pemberdayaan

1. Pengertian pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan adalah terjemahan dari *empowerment*, sedang memberdayakan adalah terjemahan dari *empower*. Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary, kata *empower* mengandung dua pengertian, yaitu: (1) *to give power* atau *authority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; (2) *to give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan.¹⁸ Pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan memperkuat atau memberdayakan kelompok masyarakat lemah. Sebagai tujuan, pemberdayaan merupakan hasil yang ingin dicapai dari proses pemberdayaan itu sendiri

¹⁷ Ibid, hal. 37

¹⁸ Endang Sutisna Sulaiman, *Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan Teori dan Implementasi*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2016, hal. 5-6.

yakni terciptanya masyarakat yang mampu secara fisik, sosial, maupun ekonomi.¹⁹

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi baik yang tersedia dalam masyarakat itu sendiri maupun hasil dari modifikasi eksternal.²⁰

Mengacu pada UU No 22/1999 pemberdayaan berarti pengikutsertaan mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemilihan (penjelasan pasal 92 ayat 1 UU 22/1999). Dengan demikian pemberdayaan bukan sekedar peningkatan partisipasi namun juga kepemilikan.²¹

Dari dua pengertian pemberdayaan diatas peneliti dapat menarik benang merah bahwa pemberdayaan adalah upaya-upaya yang dilakukan kaum berdaya untuk menjadikan kaum yang lemah menjadi berdaya.

Ada dua alasan pentingnya mengikut sertakan masyarakat dalam penyusunan program pembangunan yaitu alasan intrinsik dan alasan pragmatis. Secara intrinsik, setiap warga masyarakat berhak untuk mengetahui dan menyampaikan pendapatnya terhadap isu pembangunan, sedangkan secara

¹⁹Rosdiana Mustafa, *et al.*, *Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Perdamaian*, Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah, 2009, Cetakan Pertama, h. 120

²⁰Tumpal P. Saragi, *Otonomi Masyarakat Desa Alternatif Pemberdayaan Desa*, Jakarta: CV. Cipiruy, 2004, h. 246.

²¹Ibid

pragmatis, pemerintah selaku perencanaan dapat menggali aspirasi masyarakat.²²

Menelisik dari beberapa pendapat diatas tidak ada salahnya jika dalam penyusunan kebijakan pembangunan, pemerintah menampung aspirasi masyarakat. Masyarakat selaku objek pembangunan lebih mengerti apa yang mereka butuhkan. Dengan begitu pemerintah dapat memberikan solusi yang tepat tanpa mengesampingkan sumberdaya lokal.

2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Konsep *empowerment* muncul dengan dua premis mayor, kegagalan dan harapan. Menurut Amartya Sen dalam Sumodingrat, kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan yang berkelanjutan. Sebagaimana program-program yang telah dicanangkan pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan yang tidak kunjung menunjukkan perubahan yang berarti. Sedangkan harapan muncul karena adanya alternatif-alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai, demokrasi, persamaan jender, persamaan antar generasi, dan pertumbuhan ekonomi secara memadai.²³

²²Mustafa, *Pemberdayaan...*,h.7-8.

²³Jurnal Pembangunan Masyarakat dan Desa, Volume II, Nomor 1, Juni 2010, hal. 44.

Setelah kegagalan program-program yang telah dicanangkan, seperti program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Beras Miskin (Raskin), yang dinilai kurang efektif, maka hadirnya program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri diharapkan mampu mengurangi kemiskinan di Indonesia. Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya adalah nilai kolektif dari pemberdayaan individu. Konsep pemberdayaan masyarakat sebagai suatu pemikiran tidak dapat dilepaskan dari paradigma pembangunan yang berpusat pada masyarakat. Menurut pendekatan ini, setiap upaya pembanguana harus diarahkan pada penciptaan suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat dapat menikmati kehidupan yang jauh lebih baik, sekaligus memperluas pilihan dari setiap anggota masyarakat. Pemikiran itu pada dasarnya menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dan pelaku utama pembangunan.

Menurut Karl Marx, pemberdayaan masyarakat adalah proses perjuangan kaum *powerless* untuk memperoleh *surplus value* sebagai hak normatifnya. Perjuangan memperoleh *surplus value* dilakukan melalui distribusi penguasaan faktor-faktor produksi. Dan perjuangan untuk mendistribusikan penguasaan faktor-faktor produksi harus dilakukan melalui perjuangan politik. Kalau menurut Marx, pemberdayaan adalah pemberdayaan masyarakat, maka menurut Friedman, pemberdayaan harus dimulai dari rumah tangga.

Pemberdayaan rumah tangga adalah pemberdayaan yang mencakup aspek sosial, politik, dan psikologis. Yang dimaksud dengan pemberdayaan sosial adalah usaha bagaimana rumah tangga lemah memperoleh akses informasi, akses pengetahuan dan ketrampilan, akses untuk berpartisipasi dalam organisasi sosial, dan akses ke sumber-sumber keuangan. Yang dimaksud dengan pemberdayaan politik adalah usaha bagaimana rumah tangga yang lemah memiliki akses dalam proses pengambilan keputusan publik yang mempengaruhi masa depan mereka. Sedang pemberdayaan psikologis adalah usaha bagaimana membangun kepercayaan diri rumah tangga yang lemah.²⁴

3. Konsep Islam Tentang Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mentransformasikan pertumbuhan masyarakat sebagai kekuatan nyata masyarakat, untuk melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai dan kepentingan di dalam segenap aspek kehidupan. Pemberdayaan masyarakat mempunyai arti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bukan hanya meliputi penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosialnya.²⁵ Hal ini sejalan

²⁴Friedmann, *Empowerment: the Politics of Alternative Development*. Cambridge Mass: Blackwell Publisher, 1992, hal. 165.

²⁵Imam AN-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzab*, Penerjemah Ahmad Yunus, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015, Cetakan Pertama, hal. 94.

dengan firman Allah yang menyuruh manusia untuk selalu berusaha dalam menghadapi masalah hidup sebagai masalah pengembangan dan pemberdayaan umat Islam khususnya, sebagaimana termaktub dalam firman Allah surat Ar rad ayat 11 yang bunyinya:

لَهُمْ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا

مَرَدَّ لَهُ^ج وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ^{هـ} مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya: “Bagaimanusi ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”

Dari ayat di atas ada indikasi bahwa Allah tidak akan merubah keadaan mereka (kaum) selama mereka (kaum) tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka, maksudnya Allah menyuruh atau mengajak kita agar mau berusaha dalam menghadapi permasalahan yang ada, tidak lengah dan mudah putus asa yang mana pada dasarnya Allah tidak akan memberikan cobaan atau musibah kepada

hambanya diluar kemampuan dan Allah tidak merubah nasib hambanya selama hamba tersebut tidak mau berusaha dan bertindak yang lebih baik lagi. Allah juga akan murka dan marah pada hambanya yang tidak mau bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah dan hanya pasrah saja dalam menghadapi permasalahan yang ada. Dengan ini diharapkan masyarakat mampu untuk berusaha hidup agar lebih baik dari hari-hari sebelumnya.²⁶

Sebagaimana firman Allah diatas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri hadirberusaha memfasilitasi masyarakat miskin untuk menggali potensi yang mereka miliki dan memberikan pinjaman modal untuk meningkatkan ekonomi mereka. Masyarakat miskin tidak hanya menerima bantuan yang kemudian habis untuk dikonsumsi saat itu. Namun meraka terus bergerak dengan potensi dan modal yang telah mereka kantong untuk menjadi masyarakat yang berdaya.

C. Teori Pinjaman

Secara sederhana, pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan, yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu. Filosofi dasar

²⁶Nawawi, *Majmu'...*, h. 320

bagi seseorang yang meminjamkan uangnya kepada orang lain harus diputuskan posisinya sebagai:

1. Meminjamkan kepada saudaranya sebagai sebuah tindakan simpati
2. Meminjamkan uangnya kepada peminjam yang tujuannya untuk menyimpan uang
3. Meminjamkan uangnya sebagai investasi yang kemudian mengharapkan pembagian profitnya dari peminjam.

Poin pertama dan kedua, dia tidak memasukkan klaim beberapa jumlah uang tambahan melebihi pokok pinjaman, karena kasus pada poin satu dan dua meminjamkan dengan tujuan memberikan bantuan keuangan kepada peminjam. Poin dua, tujuannya untuk menyimpan uang yang berarti tidak menghasilkan tambahan. Jika tujuannya adalah investasi, artinya pemberi pinjaman membagi profit dan loss kepada peminjam.²⁷

Sementara dalam Islam konsep pinjaman sebagai berikut:

1. Pengertian Pinjaman (‘ariyah)

Dalam kajian bahasa arab ada beberapa istilah untuk penyebutan pinjam meminjam atau utang piutang yakni *dain*, *ariyah*, dan *qard* yang pada dasarnya adalah sama.²⁸ Kamus

²⁷ Naf’an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, cetakan pertama, hal. 55

²⁸ Dalam bahasa Arab, utang disebut dengan *dain*, sedangkan agama disebut *din*, dimana keduanya berasal dari akar kata yang sama; *dal-ya-nun*. Menurut pakar bahasa, rangkaian ketiga kata tersebut menggambarkan

bahasa Indonesia mendefinisikan utang adalah “uang yang dipinjam dari orang lain; kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima”.²⁹ Sedangkan piutang adalah “uang yang dipinjamkan kepada orang lain (dapat ditagih dari orang lain)”.³⁰

Menurut etimologi kata *Al Ariyah* menggunakan *tasydid* pada huruf yaa’, bermakna suatu yang dipinjamkan, pergi dan beredar. Asal kata ‘*ariyah* adalah kata kerja yang berbunyi *fathah* pada huruf ‘*ain*. Al Azhari berkata: *Al Ariyah* adalah nisbat kepada *al ‘arah*, ia merupakan *isim* dari kata *i’arah*. Dikatan, “Aku meminjamkannya sesuatu (أَعْرَيْتُهُ إِعْرَاءً) ” (أَعْرَيْتُهُ إِعْرَاءً) seperti kata “أَطَعْتُهُ إِطَاعَةً وَطَاعَةً” dan “أَجَبْتُهُ إِجَابَةً وَجَابَةً”. Semtara itu Al-Laits berkata, “Disebut dengan sebutan *ariyah*, karena seseorang hilir mudik untuk mendapatinya.”³¹

hubungan antara dua pihak dimana yang satu lebih tinggi ketimbang yang lain. Agama (*din*) adalah hubungan antara manusia dengan Allah, dimana kedudukan Allah tentu lebih jauh tinggi daripada manusia. Demikian pula utang piutang adalah hubungan manusia (kreditor) dengan manusia lain (debitur), dimana kedudukan kreditor lebih tinggi (berkuasa) daripada debitur.

²⁹Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus...*, h.

1602

³⁰Ibid, h. 1130.

³¹Imam AN-Nawawi, *Al Majmu’ Syarah Al Muhadzab*, , hal, 95

Secara Istilah Pinjaman adalah kewenangan pengambilan manfaat suatu barang secara halal serta wujud barangnya tetap utuh ketika dikembalikan.³² Maka utang atau pinjaman adalah aqad serah terima uang yang dilakukan dua pihak dimana pihak kedua atau yang berhutang wajib mengembalikan sejumlah uang yang sama yang telah diterima.³³

2. Dasar Hukum Pinjaman

Dasar hukum ‘Ariyah yaitu:

a. Qur’an Surah Al-Baqarah ((2):245)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرًا

وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: ‘Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan’.

³²Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2012, Cetakan 2, hal., 239

³³Dede Rodin, *Tafsir Ayat Ekonomi*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, Cetakan 1, h. 86

b. Qur'an Surah Al-Maidah ((5): 2)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا

اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : ‘‘Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya’’.

c. Qur'an Surah An-Nisa' (4): 58)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ

أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا



Artinya: ‘‘Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat’’.

d. Qur'an Surah Al-Hadid (57): 11)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ

كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya : “ Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”.

e. Qur'an Surah Al-Tagabun [64]: 17)

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضِعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

Artinya : “ Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun”.

f. Hadis:

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلَمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَا جَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَا جَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Dari Salim dari bapaknya bahwa Rasulullah Saw bersabda: Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Ia tidak boleh mendzaliminya dan menganiayanya. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa yang membebaskan kesulitan seorang muslim maka Allah akan

membebaskannya dari kesulitan pada hari kiamat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat kelak.” (HR. Muslim).

Ayat-ayat diatas menjelaskan tentang anjuran meminjamkan yang baik kepada Allah, yaitu dengan menafkahkan harta di jalan Allah yang berupa infaq, shadaqah, termasuk juga memberi pinjaman kepada orang yang sedang membutuhkan.³⁴

Penggunaan istilah “pinjaman yang baik” di dalam Al-Qur’an guna memotivasi untuk berinfaq pada jalan kebaikan. Pinjaman yang baik disini berarti memberi pinjaman dengan niat yang bersih, hati yang tulus, serta harta yang halal.³⁵

3. Rukun dan Syarat ‘Ariyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *‘ariyah* hanyalah ijab dari yang meminjam barang, sedangkan qabul bukan merupakan rukun *ariyah*. Menurut jumhur ulama, rukun *‘ariyah* yaitu sebagai berikut:

- a. Mu’jir (peminjam)
- b. Musta’jir (yang meminjamkan)
- c. Mu’ar (barang yang dipinjamkan)
- d. Shighat, yakni sesuatu yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

³⁴Ibid, h. 89

³⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al- Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Vol. I, h. 640.

Adapun syarat *'ariyah* sebagai berikut:

- a. Orang yang meminjam haruslah orang yang berakal dan cakap bertindak hukum.
- b. Barang yang dipinjam itu bukan jenis yang apabila dimanfaatkan akan habis atau musnah, seperti makanan.
- c. Barang yang dipinjam itu harus secara langsung dapat dikuasai oleh peminjam. Artinya, dalam akad ariyah pihak peminjam harus menerima langsung barang itu dan ia dapat memanfaatkan secara langsung pula.
- d. Manfaat barang yang dipinjamkan itu termasuk manfaat yang mubah (dibolehkan syara').³⁶

³⁶Wahbah , *Fiqih Imam Syafi'i...*,h. 242

BAB III

**GAMBARAN UMUM SIMPAN PINJAM KELOMPOK
PEREMPUAN (SPP) PNPM MANDIRI PEDESAAN DI DESA
DUKUHSET KECAMATAN DUKUHSETI KABUPATEN PATI**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Tempat Penelitian

a. Letak Geografis Desa Dukuhseti

Kecamatan Dukuhseti merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah Indonesia. Kecamatan ini merupakan kecamatan paling utara yang berbatasan langsung dengan kabupaten Jepara dan laut Jawa. Kecamatan Dukuhseti terletak kurang lebih 36 km ke arah utara dari pusat kota pati. Kecamatan Dukuhseti terdiri dari 12 desa. Wilayah kecamatan Dukuhseti berada pada daratan rendah yang terdapat pada kaki gunung muria. Lahan di wilayah kecamatan Dukuhseti termasuk bentuk lahan marin karena berbatasan dengan laut Jawa. Luas wilayah kecamatan Dukuhseti kurang lebih 8 hektar (Ha). Batas antar desa di wilayah kecamatan Dukuhseti ada yang berupa sungai, jalan, dan ada juga yang belum jelas. Sebelah selatan desa Dukuhseti berbatasan langsung dengan desa Alasdowo, sebelah utara berbatasan dengan desa Kembang, sebelah timur berbatasan dengan desa Banyutowo dan sebelah barat berbatasan langsung dengan desa grogolan dan

hutan Negara.¹ Tanah yang terdapat di Desa Dukuhseti berupa tanah aluvium dan tuf muria. Tanah aluvium merupakan sejenis tanah liat halus yang dapat menampung air hujan dan tergenang, terletak di pesisir pantai. Sehingga tanah ini sangat subur karena mengandung unsur hara.

b. Penduduk Desa Dukuhseti

Jumlah penduduk desa dukuhseti tahun 2015 sebanyak 8.982 jiwa dan 2.645 Kepala Keluarga. Terdiri dari laki-laki 4.480 jiwa dan perempuan 4.502 jiwa. Dari 8.982 penduduk, sebanyak 907 jiwa tergolong warga miskin. Hal ini dapat dilihat dari tabel 3.1.

TABEL 3.I
Jumlah Penduduk Dan KK Desa Dukuhseti Tahun 2015

Perempuan	Laki-laki	Jumlah	Kepala Keluarga	Miskin
4.502	4.480	8.982 jiwa	2.645	907

Sumber: Sensus Kependudukan Desa Dukuhseti Tahun 2015

c. Mata Pencaharian

Kandungan tanah di desa Dukuhseti sangatlah subur. Sehingga kebanyakan dari penduduknya berprofesi sebagai

¹ Data Batas wilayah Dan Kependudukan Desa Dukuhseti Tahun 2015

petani. Adapun penjelasan secara rincinya sebagai berikut: petani dan buruh tani 67%, nelayan 3%, pengusaha 2%, buruh industri 5%, buruh bangunan 6%, pedagang 7%, sopir 3%, Pegawai Negeri (Sipil/TNI) 2% , pensiunan 1%, lain-lain (termasuk pengangguran) sebanyak 4% orang.

TABEL 3.2
Daftar Mata Pencaharian Penduduk Desa Dukuhseti
Tahun 2015

No	Mata Pencaharian	Prosentase
1	Petani& Buruh tani	67%
2	Nelayan	3%
3	Pengusaha	2%
4	Buruh industry	5%
5	Buruh bangunan	6%
6	Pedagang	7%
7	Sopir	3%
8	PNS	2%
9	Pensiunan	1%
10	Lain-lain	4%
Jumlah		100%

Sumber: Sensus kependudukan desa Dukuhseti tahun 2015.²

²Data Sensus Kependudukan Desa Dukuhseti Tahun 2015

B. Profil Simpan Pinjam Kelompok Perempuan PNPM Mandiri Pedesaan

Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Khusus untuk pengembangan PNPM Mandiri perdesaan dilakukan dengan dasar kebijakan Surat Keputusan Menkesra No 25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007, dan ditindaklanjuti dengan kebijakan ditingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.³

Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.⁴

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk

³Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, *Petunjuk Teknis Operasional*, hal. 2

⁴Ibid

memobilisasi sumberdaya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah:

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya.
2. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif.
3. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat.
5. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.⁵

Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajarandilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK).⁶

⁵ Ibid, h. 6

⁶ Ibid

Tujuan Umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Tujuan khususnya meliputi:

1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.
2. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal.
3. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif.
4. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat.
5. Melembagakan pengelolaan dana bergulir.
6. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa.
7. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.⁷

Sesuai dengan Pedoman Umum, PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun

⁷Ibid, h. 2

tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri Perdesaan. Prinsip-prinsip itu meliputi:

1. Bertumpu pada pembangunan manusia.

Bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia dari pada pembangunan fisik semata.

2. Otonomi.

Otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negatif dari luar.

3. Desentralisasi

Desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat.

4. Berorientasi pada masyarakat miskin.

Berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin.

5. Partisipasi

Partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian

kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil.

6. Kesetaraan dan keadilan gender.

Kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik.

7. Demokratis.

Demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat.

8. Transparansi dan Akuntabel.

Transparansi dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.

9. Prioritas.

Prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan.

10. Keberlanjutan.

Keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan

pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya.⁸

Masyarakat desa Dukuhseti mulai mengenal PNPM Mandiri Perdesaan pada tahun 2009, terutama program Simpan Pinjam Khusus Perempuan. Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, dengan hadirnya program SPP di tengah masyarakat desa Dukuhseti diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Program SPP membantu memfasilitasi masyarakat dalam hal permodalan. Menyadarkan masyarakat untuk menggali potensi sumber daya alam yang ada dengan kemampuan yang mereka miliki. Memberikan kesempatan kaum perempuan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha, mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.⁹

C. Pedoman Penerapan Simpan Pinjam Khusus Perempuan PNPM Mandiri Pedesaan

PNPM Mandiri Pedesaan pada prinsipnya adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin pedesaan secara mandiri melalui peningkatan partisipasi masyarakat (terutama masyarakat miskin, kelompok perempuan dan komunitas atau kelompok yang terpinggirkan), meningkatnya

⁸PTO Penjelasan IV: Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, Jakarta, hlm. 58.

⁹Wawancara dengan Bapak Anas selaku fasilitator PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Dukuhseti, 5/3/2017.

kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah, meningkatnya modal sosial masyarakat serta inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

Usulan kegiatan yang dapat didanai dalam PNPM Mandiri Pedesaan dapat diklasifikasikan atas 4 jenis kegiatan yang meliputi : (1) kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin, (2) peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat, (3) Kegiatan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal. 4) Penambahan permodalan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP).¹⁰

Pada kesempatan kali ini peneliti fokus mengkaji pada kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan. Kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Adapun tujuan dan ketentuannya sebagai berikut:

1. Tujuan

¹⁰Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, PTO Penjelasan V: Jenis Dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM Mandiri pedesaan, Jakarta, h. 1.

a. Tujuan Umum

Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.

b. Tujuan Khusus

1. Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar.
2. Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha.
3. Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

2. Ketentuan

a. Ketentuan Dasar

- 1) Kemudahan, artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan .
- 2) Terlembagakan, artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman.

- 3) Keberdayaan, artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang professional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan.
- 4) Pengembangan, artinya setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan.
- 5) Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

b. Ketentuan Pendanaan Bantuan Langsung Masyarakat

PNPM mandiri pedesaan merupakan program pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, artinya program ini direncanakan, dilaksanakan dan didanai bersama-samaberdasarkan persetujuan dan kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah.

Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat untuk setiap kecamatan dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu:

1. Alokasi berdasarkan keberadaan desa tertinggal

Kecamatan yang mempunyai desa tertinggal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, maka alokasi BLM nya berdasarkan jumlah desa tertinggal yang ada di

kecamatan tersebut.¹¹Data Desa Tertinggal merujuk padadata yang ditetapkan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Alokasi BLM Kecamatan yang mempunyai desa tertinggal, dengan ketentuan sebagai berikut: Tabel 3.3

TABEL 3.3
Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

Jumlah Desa Tertinggal	Alokasi BLM (Rupiah)
<3	1.000.000.000
4	1.250.000.000
5	1.500.000.000
6	1.500.000.000
7	1.750.000.000
8	2.000.000.000
9	2.250.000.000
10	2.500.000.000
11	2.750.000.000
>12	3.000.000.000

Sumber : Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan

¹¹Ibid,hal 60

2. Alokasi Berdasarkan Ratio Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk di Kecamatan.

Untuk kecamatan-kecamatan yang tidak mempunyai desa tertinggal yang telah ditentukan pemerintah, dialokasikan dengan menggunakan rasio penduduk miskin dan jumlah penduduk dalam kecamatan, dengan ketentuan sebagai berikut: Tabel 3.4.¹²

Tabel 3.4
Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat

Lokasi	Jumlah Penduduk	Persen Penduduk Miskin	Alokasi BLM (Rupiah)
Jawa	< 25.000	≤ 40%	1.500.000.000
		> 40%	1.750.000.000
	25.000-50.000	≤ 40%	1.750.000.000
		> 40%	2.000.000.000
	> 50.000	< 20%	2.250.000.000
		20% sd 40%	2.500.000.000
		> 40%	3.000.000.000
Luar Jawa	< 15.000	≤ 40%	1.500.000.000
		> 40%	1.750.000.000
	15.000-25.000	≤ 40%	1.750.000.000

¹² Ibid, h. 61

		> 40%	2.000.000.000
	> 25.000	< 20%	2.250.000.000
		20% sd 40%	2.500.000.000
		> 40%	3.000.000.000

Sumber : Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri pedesaan

Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang disediakan untuk mendanai kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) perkecamatan maksimal 25 % dari alokasi BLM.

3. Sasaran, Bentuk Kegiatan dan Ketentuan Kelompok SPP

1. Sasaran Program

Sasaran program merupakan rumah tangga miskin yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam khusus perempuan yang sudah ada di masyarakat.

2. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman.

3. Ketentuan Kelompok Simpan Pinjam

Ketentuan kelompok SPP adalah:

1. Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan, yang satu sama saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun.
 2. Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati.
 3. Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota.
 4. Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik.¹³
 5. Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.
- ### 4. Mekanisme Pengelolaan

Mekanisme tetap mengacu pada alur kegiatan program akan tetapi perlu memberikan beberapa penjelasan dalam tahapan sebagai berikut :

a. Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi

Dalam MAD Sosialisasi dilakukan sosialisasi ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan SPP sehingga

¹³Ibid

pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan SPP dan dapat memanfaatkan.

b. Musdes Sosialisasi

Dalam Musdes sosialisasi dilakukan sosialisasi ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan SPP ditingkat desa sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan SPP dan melakukan persiapan proses lanjutan.

c. Musyawarah Dusun

Proses identifikasi kelompok melalui musyawarah di dusun/kampung dengan proses sebagai berikut :

1. Identifikasi kelompok sesuai dengan ketentuan tersebut di atas termasuk kondisi anggota.
2. Kader melakukan identifikasi perkembangan kelompok SPP dan melakukan kategorisasi kelompok yang terdiri dari: kelompok pemula, kelompok berkembang dan kelompok siap. Proses kategorisasi kelompok mengacu pada ketentuan kategori perkembangan kelompok. Menyiapkan daftar pemanfaat setiap kelompok beserta jumlah kebutuhan dan daftar rumah tangga miskin yang akan menjadi pemanfaat.
3. Rumah tangga miskin yang belum menjadi anggota kelompok agar dilakukan tawaran dan fasilitasi untuk

menjadi anggota kelompok sehingga dapat menjadi pemanfaat.

Hasil musyawarah dusun dituangkan dalam berita acara dilampiri:

- a. Daftar kelompok yang diidentifikasi
 - b. Kelompok SPP dengan daftar pemanfaat yang diusulkan,
 - c. Peta sosial dan peta rumah tangga miskin,
 - d. Rekap kebutuhan pemanfaat.
- d. Musyawarah Desa dan Musyawarah Khusus Perempuan (MKP)

Musyawarah ini merupakan tahapan seleksi di tingkat desa adalah:

1. Penentuan usulan desa untuk kegiatan SPP melalui keputusan Musyawarah Khusus perempuan (MKP). Hasil keputusan dalam MKP merupakan usulan desa untuk kegiatan SPP.
2. Hasil keputusan diajukan berdasarkan seluruh kelompok yang diusulkan dalam paket usulan desa.
3. Penulisan usulan kelompok adalah tahapan yang menghasilkan proposal kelompok yang akan dikompetisikan di tingkat kecamatan.
4. Dalam penulisan usulan SPP paling tidak harus memuat hal sebagai berikut :

Sekilas kondisi kelompok SPP

- a. Gambaran kegiatan dan rencana yang menjelaskan kondisi anggota, kondisi permodalan, kualitas pinjaman, kondisi operasional, rencana usaha dalam satu tahun yang akan datang, perhitungan rencana kebutuhan dana.
 - b. Daftar calon pemanfaat untuk dana yang diusulkan dilengkapi dengan peta sosial dan peta rumah tangga miskin.
- e. Verifikasi

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses verifikasi kegiatan SPP adalah :

1. Penetapan Formulir Verifikasi.

Penetapan formulir verifikasi merupakan proses penyesuaian dengan contoh format formulir yang telah tersedia. Contoh format formulir masih harus disesuaikan dengan kondisi lokal namun tidak mengurangi prinsip dasar penilaian dengan model *CAMEL* (*Capital, Assets, Management, Earning* dan *Liquidity*) yaitu : penilaian tentang permodalan, kualitas pinjaman, manajemen, pendapatan dan likuiditas.¹⁴

2. Proses Pelaksanaan Verifikasi.

Verifikasi kelompok SPP mencakup beberapa hal sebagai berikut :

¹⁴Ibid, h. 63

- a. Pengalaman kegiatan simpan pinjam
- b. Persyaratan kelompok
- c. Kondisi kegiatan simpan pinjam, dengan penilaian :
 - 1. Permodalan
 - 2. Kualitas Pinjaman
 - 3. Administrasi dan Pengelolaan
 - 4. Pendapatan
 - 5. Likuiditas (pendanaan jangka pendek)
- d. Penilaian khusus rencana kegiatan.
- e. Jumlah rumah tangga miskin sebagai calon pemanfaat diverifikasi dengan daftar rumah tangga miskin.
- f. Penilaian kategorisasi kelompok.

Ada beberapa indikator dalam penilaian kategorisasi kelompok. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.5 di bawah ini:

TABEL 3.5
Kategorisasi Tingkat Perkembangan Kelompok

Tabel Indikator Perkembangan Kelompok SPP				
Indikator	<i>Nilai = 1</i>	<i>Nilai = 2</i>	<i>Nilai = 3</i>	<i>Nilai = 4</i>
Ikatan pemersatu	Ikatan pemersatu adalah domisili atau geografis atau keluarga	Ikatan pemersatu kegiatan kemasyarakatan / ekonomi/ simpan pinjam kurang dari satu tahun	Ikatan pemersatu kegiatan simpan pinjam antara satu tahun sampai tiga tahun	Ikatan pemersatu kegiatan simpan pinjam lebih dari 3 tahun
Kegiatan anggota untuk tujuan bersama	Belum mempunyai kegiatan secara rutin	Mempunyai kegiatan tetapi belum terencana dengan baik	Mempunyai kegiatan simpan pinjam yang masih berjalan dengan baik.	Mempunyai kegiatan simpan pinjam yang terus berkembang dengan baik
Pengurus	Belum mempunyai pengurus yang	Pengurus belum mempunyai pertemuan tetapi belum secara	Pengurus mempunyai pertemuan rutin tetapi belum	Pengurus mempunyai pertemuan rutin dan

Tabel Indikator
Perkembangan Kelompok SPP

Indikator	<i>Nilai = 1</i>	<i>Nilai = 2</i>	<i>Nilai = 3</i>	<i>Nilai = 4</i>
	disepakati oleh anggota	rutin	mempunyai agenda pertemuan terencana	mempunyai agenda pertemuan yang terencana dengan baik.
Aturan kelompok	Belum ada kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama	Mempunyai kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama tetapi tidak secara tertulis	Mempunyai aturan tertulis tetapi belum seluruhnya dilaksanakan	Mempunyai AD/ART yang telah dilaksanakan dengan baik
Iuran anggota	Belum mempunyai iuran anggota secara wajib/tetap	Mempunyai iuran tetapi belum mencukupi untuk operasional kelompok	Mempunyai iuran wajib dan sukarela untuk operasional kelompok	Mempunyai iuran wajib , iuran sukarela dan simpanan sebagai modal usaha kelompok
Administrasi	Belum mempunyai administrasi	Mempunyai administrasi tertulis tetapi	Mempunyai administrasi tertulis dan mempunyai	Mempunyai administrasi tertulis dan mempunyai

Tabel Indikator Perkembangan Kelompok SPP				
Indikator	<i>Nilai = 1</i>	<i>Nilai = 2</i>	<i>Nilai = 3</i>	<i>Nilai = 4</i>
kelompok	secara tertulis	belum mempunyai laporan tertulis	laporan tertulis tetapi belum secara rutin dipertanggung- jawabkan	laporan tertulis dan secara rutin dipertanggung - jawabkan

Sumber: Pedoman Kegiatan SPP PNPM Mandiri Pedesaan

Dengan memperhatikan indikator-indikator tersebut diatas dan memberikan nilai pada setiap indikator kemudian menjumlahkan nilai maka terhadap kelompok dapat dikategorisasi menjadi :

- 1) Kelompok pemula adalah jika hasil penjumlahan nilai tiap-tiap indikator sampai dengan 9 (sembilan).
 - 2) Kelompok berkembang adalah jika hasil penjumlahan nilai tiap-tiap indikator antara 10 (sepuluh) sampai dengan 18 (delapan belas).
 - 3) Kelompok siap/matang adalah jika hasil penjumlahan nilai tiap-tiap indikator diatas 18 (delapan belas).
- g. Pembuatan Berita Acara (BA) hasil verifikasi, dalam BA tersebut mencantumkan rekomendasi rekomendasi termasuk jumlah usulan kelompok

apakah sudah dalam kewajaran, keterlibatan rumah tangga miskin sebagai pemanfaat, dan kategorisasi perkembangan kelompok.

f. Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas Usulan.

Tahapan ini merupakan tahapan evaluasi akhir dengan model prioritas kebutuhan dengan mempertimbangkan hasil verifikasi. Prioritas penilaian ditekankan pada kelompok yang lebih mengutamakan calon pemanfaat kategori rumah tangga miskin.

Dalam tahapan prioritas kebutuhan ini menilai usulan-usulan kelompok yang tergabung dalam paket usulan desa. Penilaian dilakukan dengan basis usulan kelompok sehingga jika ada kelompok yang tidak layak maka tidak secara otomatis menggugurkan paket usulan desa tersebut, kelompok yang dianggap layak tetap mendapatkan pendanaan sampai jumlah kuota BLM terpenuhi.

Pemeringkatan dilakukan pada seluruh kelompok SPP tanpa memperhatikan asal desanya, sehingga ranking prioritas yang diperoleh merupakan peringkat kelompok bukan peringkat paket usulan desa atau desa.

Hasil pemeringkatan kelompok SPP sudah dapat menunjukkan kebutuhan pendanaan BLM untuk SPP sehingga sudah dapat ditentukan kelompok-kelompok layak yang akan didanai dari BLM. Untuk kelompok yang

layak dan akan didanai BLM, tahap selanjutnya adalah melakukan penyempurnaan dokumen usulan misalnya: KTP dan Perjanjian Pinjaman. Prioritas kebutuhan kelompok SPP agar mempertimbangkan :

- a. Keterlibatan rumah tangga miskin sebagai anggota dan pemanfaat.
 - b. Kategori tingkat perkembangan kelompok.
 - c. Hasil Penilaian kelayakan kelompok pengusul yang dituangkan dalam Berita acara tim verifikasi.
 - d. Pertimbangan lain yang mendukung pengurangan jumlah rumah tangga miskin dan peningkatan kesempatan kerja atau usaha.
- g. Musyawarah Antar Desa Penetapan Usulan

Pada tahapan ini keputusan pendanaan mencakup penentuan pendanaan usulan dengan menentukan kelompok-kelompok yang telah memenuhi syarat pemeringkatan dapat didanai dengan dana BLM. Dalam MAD penetapan usulan ini, dimungkinkan adanya kelompok yang didanai sesuai dengan MAD prioritas usulan mengundurkan diri sehingga peringkat selanjutnya yang akan menerima, jika terjadi tidak sama jumlah kebutuhan pada kelompok terakhir maka agar diputuskan melalui musyawarah. Bagi kecamatan yang telah

mengelola dana bergulir maka pada MAD ini dapat juga dilakukan proses MAD perguliran.¹⁵

h. Penetapan Persyaratan.

Penetapan persyaratan pinjaman yang tertuang dalam perjanjian pinjaman paling tidak mencakup hal-hal :

- a Penentuan jasa pinjaman dengan ketentuan: besar jasa pinjaman ditentukan berdasarkan bunga pasar untuk pinjaman pada lembaga keuangan pada wilayah masing-masing. Sistem perhitungan jasa pinjaman menurun atau tetap.
- b Jangka waktu pinjaman sumber dana BLM maksimal 12 bulan.
- c Jadwal angsuran dana BLM paling tidak diangsur 3 kali angsuran dalam 12 bulan dengan memperhatikan dengan siklus usaha baik pada tingkat pemanfaat maupun tingkat kelompok.
- d Angsuran langsung dari kelompok ke UPK.

i. Pencairan Dana

Ketentuan pencairan dana BLM dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pencairan melalui desa sesuai dengan ketentuan program dilampiri SPPB dengan bukti penyaluran KW2.

¹⁵Ibid, h. 61

- 2) Pencairan dilakukan sekaligus (100%) pada setiap kelompok.
- 3) Dalam saat yang bersamaan ketua TPK memberikan dana SPP setelah dikurangi operasional UPK 2% dan operasional desa 3% dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh ketua kelompok sebagai penerima dan UPK sebagai pengelola kegiatan. Tujuan kuitansi ini adalah kelompok telah menerima langsung dari UPK dan selanjutnya mengembalikan kepada UPK.
- 4) Kelompok membuat perjanjian pinjaman dengan UPK sebagai lampiran kuitansi penerimaan dana.
- 5) Kelompok menyerahkan kuitansi atau tanda terima uang per pemanfaat kepada UPK.

D. Standar Prosedur Operasional (SPO) Perguliran Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

Salah satu kegiatan UPK adalah mengelola keuangan dan pelayanan pinjaman kepada masyarakat melalui kelompok-kelompok khusus perempuan. Pengelolaan keuangan tersebut perlu disusun sebuah pedoman pola dan mekanisme perguliran yang harus ditetapkan dan disyahkan oleh MAD.

1. Musyawarah Perguliran

Musyawarah Perguliran dilakukan sesuai kebutuhan, bertujuan :

- a. Membahas hasil verifikasi perguliran.

- b. Menetapkan Kelompok Peminjam.
 - c. Keputusan Pendanaan Pinjaman.
2. Kelompok Daftar Tunggu
- a. Kelompok Daftar Tunggu merupakan kelompok peminjam yang telah diajukan kepada UPK dan telah ditetapkan memperoleh pinjaman.
 - b. Kelompok yang sedang mempunyai pinjaman, boleh mengajukan pinjaman kembali jika sisa angsuran masih 1 (satu) kali.
3. Persyaratan Peminjam Bagi Kelompok
- a. Jumlah peminjam setiap kelompok 5 sampai 10 orang
 - b. Jenis kelompok merupakan kelompok Simpan Pinjam yang beranggotakan khusus perempuan, yang mempunyai kegiatan ekonomi.
 - b. 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggota memiliki usaha produktif dari berbagai sektor.
 - c. Kelompok & Anggota peminjam berada di wilayah Kecamatan Dukuhseti.
 - d. Pinjaman hanya akan diberikan kepada kelompok-kelompok yang sudah jelas keberadaanya dan mantap dari sisi organisasinya.
 - e. Kelompok memiliki pengurus minimal 3 (tiga) orang (ketua, Sekretaris dan Bendahara).

- f. Kelompok memiliki Administrasi Pembukuan yang sederhana akan tetapi memenuhi kaedah pembukuan dan dikerjakan secara tertip dan teratur.
 - g. Kelompok memiliki aturan dan dilaksanakan oleh seluruh anggota dan pengurus kelompok.
 - h. Pengelolaan Kelompok dikelola secara terbuka.
5. Ketentuan Pinjaman
- a. Jasa (bunga) pinjaman, ditetapkan kepada kelompok sebesar 1,5% perbulan tetap (*flate rate*).
 - b. Jangka waktu pinjaman maksimal 12 bulan.
 - c. Cara atau sistem angsuran setiap bulan, dibayar pokok dan jasanya.
 - d. Pinjaman yang diterima diberikan dengan ketentuan :
 - 1) Menandatangani surat pernyataan kesanggupan pengembalian pinjaman dan Tanggung rentang kelompok diatas materai Rp. 6000.
 - 2) Membuat surat pernyataan dari pengurus kelompok dan anggota kelompok, jika terjadi permasalahan atas pinjaman yang diterima maka peminjam (kelompok dan anggota) bersedia menyerahkan harta benda yang ada dirumah / yang dimiliki oleh peminjam.
 - 3) Pinjaman awal untuk anggota kelompok baru sebesar Rp. 1.000.000.
 - 4) Kenaikan pinjaman sebesar Rp. 500.000 – Rp. 2.000.000.

6. Prosedur Pemberian & Pencairan Pinjaman Kelompok.
 - a. Anggota dengan persetujuan suami mengajukan pinjaman secara tertulis kepada pengurus kelompok.
 - b. Bila disetujui oleh pengurus kelompok, maka pengurus kelompok merekap pengajuan anggota, selanjutnya menulis proposal pinjaman kelompok disertai dengan persyaratan yang dibutuhkan seperti photo copy KTP calon peminjam dan pernyataan kesediaan tanggung rentang dan pernyataan jaminan untuk dan disahkan oleh kepala Desa. Setelah lengkap selanjutnya pengurus kelompok menyerahkan kepada UPK.
 - c. Form proposal pinjaman kelompok ditentukan dan diterbitkan oleh UPK.
 - d. Proposal pengajuan paling lambat diterima UPK setiap tanggal 5 per bulan, proposal yang masuk setelah tanggal tersebut akan diproses pada bulan berikutnya.
 - e. UPK menerima-meneliti (memvalidasi) kebenaran atas proposal beserta lampirannya, apabila belum lengkap dan benar maka berkas-berkas proposal dikembalikan kepada pengurus kelompok untuk dilengkapi atau dibetulkan.
 - f. Berkas-berkas proposal yang dinyatakan lengkap oleh UPK disampaikan kepada TV
 - g. Tim Verifikasi mengadakan kunjungan lapangan untuk melakukan Analisa permohonan pinjaman (Study Kelayakan).

- h. Berdasarkan hasil kunjungan lapangan, TV membuat rekomendasi kelayakan pengajuan pinjaman.
 - i. Hasil rekomendasi TV dibahas pada rapat Tim Pendanaan. Rapat Tim Pendanaan memutuskan besaran pendanaan pinjaman.
 - j. Berdasarkan hasil Rapat Tim Pendanaan, Pengurus UPK membuat jadwal realisasi penyaluran Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) langsung kepada pemanfaatan dan bergulir pada forum musyawarah kelompok.
 - k. Pengurus UPK membuat laporan realisasi penyaluran dana bergulir.
 - l. Pengurus UPK membuat laporan perkembangan pinjaman secara berkala setiap bulan.
7. Masa Verifikasi Pinjaman
- 1). Masa verifikasi pinjaman kelompok dilaksanakan sebelum Rapat Tim Pendanaan.
 - 2). Tim Pendanaan melaksanakan Rapat Pendanaan Tanggal 10 setiap bulan.
8. Persiapan Pencairan Pinjaman
- UPK, mempersiapkan berkas-berkas pencairan yang meliputi :
- 1) Surat perjanjian pinjaman/kredit (SPK) minimal rangkap 2 (dua) dan bermaterai secukupnya. Berkas yang bermaterai yang ditandatangani oleh pengurus kelompok disimpan oleh UPK dan satu salinan berkas yang tidak bermaterai diserahkan kepada pengurus kelompok.

- 2) Kartu pinjaman rangkap 2 (dua) beda warna, satu untuk kelompok dan satu lainnya disimpan di UPK.
- 3) Penandatanganan SPK dilakukan langsung antara UPK (yang mewakili) dengan pengurus kelompok, yang diketahui oleh Kepala Desa.
- 4) Surat perjanjian kredit/ pinjaman (SPK) dan dokumen dan dokumen lain diarsipkan dengan tertib oleh UPK.
- 5) Ketua kelompok memperoleh buku angsuran atau kas kelompok sebagai bukti kegiatan kelompok.
- 6) Form buku angsuran atau kas kelompok ditentukan dan diterbitkan oleh UPK.

9. Penarikan Dana Dari Bank

UPK mempersiapkan proses penarikan dana dari bank.

1. Daftar kelompok setidaknya-tidaknya memuat : Nama Kelompok, Alamat Kelompok, Jumlah Anggota, Jumlah Pengajuan Pinjaman, Jumlah Pinjaman disetujui, rangkap 2 (dua), selanjutnya ditandatangani oleh pemegang Spesimen.
2. Slip pengambilan / penarikan bank rangkap 2 (dua).
3. Slip pengambilan dan daftar kelompok pada angka 2 dan 3 , setelah ditandatangani oleh para pemegang Spesimen, 1 (satu) copy ditinggal/ diserahkan kepada pemegang spesimen sebagai arsip, slip pengembalian uang digunakan untuk menarik uang dibank serta daftar kelompok yang sudah ditandatangani secara lengkap disimpan di UPK.

10. Penghargaan Kelompok

Bagi kelompok yang membayar dengan tepat tanggal dan tepat jumlah (tidak melebihi 3 hari) dari jatuh tempo pembayarannya setiap bulanya, maka kelompok akan diberikan Insentif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW) sebesar 5 % dari jumlah bunga yang telah disetor kepada UPK, diberikan saat pinjaman lunas dan diberikan kupon undian.

11. Peminjam Meninggal Dunia

Bagi peminjam yang meninggal dunia dan masih mempunyai kewajiban mengangsur, maka ahli waris yang tertera dalam surat persetujuan suami yang melanjutkan pembayaran angsuran sampai dengan lunas, jika ahli waris/ kelompok tidak sanggup dan dipandang tidak mampu membayar angsuran sampai lunas maka yang bersangkutan/ almarhum dapat dilakukan tindakan penghapusan pinjaman.

Ketua kelompok membuat surat keterangan meninggal dunia yang diketahui oleh pihak keluarga dan pemerintah desa. Bagi peminjaman yang meninggal dunia dan tidak mampu keluarganya dapat menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah Desa.

Dari deskripsi diatas pemelihan penerima manfaat Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari PNPM Mandiri Pedesaan kabupaten Pati memiliki Standar Prosedur Operasional (SPO) yang sudah lengkap. Hal ini dibuktikan dari aturan-aturan tersebut diatas,

tindak lanjut kemudian adalah melihat implementasi atas pelaksanaan kebijakan pemilihan pemilihan peserta penerima manfaat BLM PNPM Mandiri pedesaan program Simpan Pinjam Khusus Perempuan tersebut, apakah tepat sasaran atau tidak. Dan hal tersebut akan dibahas pada bab berikutnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Di Desa Dukuhseti

Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan merupakan program penyedia akses layanan keuangan yang berupa pinjaman modal khusus perempuan. Program tersebut diperuntukan bagi masyarakat miskin terutama yang tidak memiliki akses untuk memperoleh pelayanan kredit dari bank.

Desa Dukuhseti merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Dukuhseti. Tanah yang terdapat di Desa Dukuhseti berupa tanah aluvium dan tuf muria. Tanah aluvium merupakan sejenis tanah liat halus yang dapat menampung air hujan dan tergenang, terletak di pesisir pantai. Sehingga tanah ini sangat subur karena mengandung unsur hara.

Sebagian besar warga desa dukuhseti berpenghidupan dari hasil bertani. Hampir semua jenis tanaman cocok ditanam di lahan desa dukuhseti. Masyarakat tani desa dukuhseti menggantungkan hidupnya pada lahan sawah dan lahan hutan. Sebagaimana petani pada umumnya, petani desa Dukuhseti tidak selalu mendapati hasil panennya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kadang kala musim tidak bersahabat, tanaman padi pun

terserang hama. Tidak hanya sampai disitu kendala-kendala yang mereka hadapi, ketika tanaman yang mereka tanam selamat dari hama dan menghasilkan panen yang memuaskan, harga penjualan hasil panen sering kali hanya terpaut selisih sedikit dari biaya yang mereka keluarkan. Sehingga sering kali mereka kehabisan modal untuk menanam lahan mereka kembali. Dan warga yang bekerja sebagai pocok (buruh tani) menjadi pengangguran sementara.¹

Hadirnya SPP diharapkan mampu menggerakkan kaum perempuan untuk membantu ekonomi keluarga dengan menggunakan dana pinjaman tersebut sebagai modal untuk membuka usaha baru ataupun mengembangkan usaha yang telah ada.

Kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Secara khusus tujuan SPP adalah mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha, mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

Pada dasarnya implementasi program SPP di PNPM mandiri pedesaan memiliki landasan utama sebagai berikut:

¹ Wawancara Kepada Warga Desa Dukuhseti, 21/02/2017 Pukul 14.25

1. Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) diperuntukkan rumah tangga miskin yang produktif.

Dalam hal ini program SPP memfasilitasi masyarakat miskin untuk mendapatkan modal berupa pinjaman dengan bunga rendah serta akses yang mudah. Pengajuan pinjaman SPP tidak menggunakan agunan, namun dengan menyerahkan jaminan kepada kelompok yang dipegang oleh ketua kelompok atau yang disebut dengan tanggung renteng. Sehingga memudahkan masyarakat miskin dalam mendapatkan pinjaman tidak seperti lembaga keuangan pada umumnya. Tingkat jasa pengembalian atau bunga SPP lebih rendah dibandingkan lembaga keuangan lainnya yaitu, 1,5%. Sehingga SPP diharapkan mampu mengurangi praktik rentenir yang beredar di masyarakat.

Kriteria dan indikator penerima manfaat pinjaman SPP sebagai berikut:

1. Keluarga miskin
 - a. Pendapatan keluarga kurang dari 1.000 kg setara beras perkapita pertahun.
 - b. Tidak memiliki akses untuk memperoleh pelayanan kredit dari bank
2. Punya karakter baik
 - a. Diterima oleh lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan usahanya

- b. Memiliki sikap hidup hemat dan suka menabung
 - c. Tidak pernah memiliki kredit macet dari sumber pinjaman manapun
3. Memiliki usaha
 - a. Anggota melakukan kegiatan usaha dalam salah satu sektor ekonomi sebagai sumber penghasilan keluarga
 4. Usaha menguntungkan
 - a. Tingkat laba bersih usaha minimal dua kali jasa deposito di bank terdekat
 - b. Usaha telah dilakukan lebih dari enam bulan atau minimal dua siklus usaha.
 5. Jumlah maupun nilai penjualan usaha dapat ditingkatkan
 - a. Permintaan pelanggan maupun pembeli baru belum dapat dipenuhi.
 - b. Jumlah produksi dapat ditingkatkan atau barang dagangan mudah diperoleh.
 - c. Anggota memiliki keinginan kuat untuk mengembangkan usahanya.
 6. Membutuhkan kredit untuk tambahan modal
 - a. Anggota tidak memiliki cukup modal sendiri untuk mengembangkan usahanya.
 - b. Anggota tidak sedang memiliki sisa pinjaman dari sumber kredit lain.
 7. Memiliki kemampuan mengembalikan kredit

- a. Jumlah angsuran pokok dan bunga kredit lebih kecil dari jumlah pendapatan keluarga dikurangi biaya hidup.²

Sasaran SPP merupakan rumah tangga miskin yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam khusus perempuan yang sudah ada di masyarakat.

Namun pada pelaksanaannya SPP di desa penelitian belum tepsasaran karena nama penerima manfaat SPP tidak sesuai dengan data masyarakat miskin yang ada pada dinas sosial . Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.4

TABEL 4.1

Jumlah Penerima Pinjaman

Kelompok	Jumlah Sesuai Dinas Sosial		Jumlah Tidak Sesuai Dinas Sosial		Total
	Jumlah	%	Jumlah	%	
Bugenvil	3	33	6	66	9
Rajawali Indah	3	33	6	66	9
Merpati I	2	20	8	80	10
Merpati II	2	20	8	80	10
Total					38

Sumber: Laporan SPP dari Kecamatan Dukuhseti

² Formulir Verifikasi Kelayakan Kelompok SPP

Dari tabel 4.4 terlihat bahwa jumlah penerima manfaat SPP untuk kelompok bugenvil dari 9 orang anggota yang sesuai dengan Dinas Sosial adalah sebanyak 3 orang atau sebesar 33% dan yang tidak sesuai dengan Dinas Sosial adalah sebanyak 6 orang atau sebesar 66%, kelompok Rajawali I dari 9 orang anggota penerima manfaat yang sesuai dengan Dinas Sosial adalah 3 orang atau sebesar 33% sedangkan yang tidak sesuai dengan Dinas Sosial adalah 6 orang atau sebesar 66%, kelompok Merpati I dari 10 orang anggota jumlah penerima manfaat yang sesuai dengan Dinas Sosial adalah sebanyak 2 orang atau sebesar 20% dan yang tidak sesuai dengan Dinas Sosial sebanyak 8 orang atau sama dengan 80% , dan kelompok merpati II dari 10 orang anggota jumlah penerima manfaat SPP yang sesuai dengan Dinas Sosial sebanyak 2 orang atau sebesar 20% sedangkan yang tidak sesuai dengan Dinas Sosial sebanyak 8 orang atau sebesar 80%.

2. Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) memiliki tujuan untuk:
 - a. Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar.
 - b. Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha.
 - c. Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.
3. SPP memiliki prosedur pengajuan pinjaman sebagai berikut:

- a. Pertemuan kelompok
- b. Permohonan atau proposal pinjaman (berkas-berkas, surat pengajuan, dan lain sebagainya)
- c. Kepala desa merekomendasikan proposal permohonan dan berkas-berkas
- d. Proposal divalidasi awal oleh UPK
- e. Uji kelayakan pinjaman oleh tim verifikasi
- f. Tim verifikasi membuat rekomendasi kelayakan berdasarkan analisis kunjungan lapangan
- g. Putusan (persetujuan atau pemolakan dan juga besaran) pinjaman
- h. Pemberitahuan kepeminjam (besar bunga, jangka waktu dan lain sebagainya)
- i. Pencairan pinjaman (penandatanganan akad kredit)
- j. Monitoring dan pendampingan
- k. Pengembalian pinjaman.
- l. Pelaporan pinjaman bergulir.
- m. Penyelesaian pinjaman bermasalah.

Pelaksanaan SPP di desa penelitian belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur yang ada di PNPM Mandiri pedesaan. Seperti pada tahap pemeriksaan pinjaman, survei pada calon peminjam belum sepenuhnya dilaksanakan. Survei merupakan hal pokok dalam menentukan layak tidaknya pengajuan pinjaman untuk disetujui dengan memperhatikan kriteria peminjam yang sesuai dengan prosedur SPP. Karena kelalaian

dalam hal survei ini berdampak pada ketidak tepat sasaran peminjam. Selain pada tahap pemeriksaan pinjaman yang belum maksimal, pembinaan pinjaman dan monitoring belum juga dilaksanakan.

4. Besar dana SPP yang digulirkan di kecamatan Dukuhseti

Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan di kecamatan Dukuhseti mulai beroperasi sejak tahun 2009 sampai sekarang. Modal awal dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM PNPB) tahun 2009 sebesar Rp. 500.000.000,00, tahun 2010 Rp. 500.000.000,00, tahun 2011 Rp. 426.000.000,00, tahun 2012 Rp. 217.500.000,00 . Total modal awal SPP perguliran Rp. 1.643.500.000,00 disalurkan ke 137 kelurahan yang berasal dari 12 desa di kecamatan Dukuhseti. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini:

TABEL 4.2
Modal Awal Perguliran SPP

Tahun	Nominal
2009	Rp. 500.000.000,00
2010	Rp. 500.000.000,00
2011	Rp. 426.000.000,00
2012	Rp. 217.500.000,00
Total Modal Awal Rp. 1.643.500.000,00	

Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban SPP Kecamatan Dukuhseti Tahun 2015

Setelah digulirkan selama 7 tahun modal SPP yang awalnya Rp. 1643.500.000,00 telah berkembang menjadi Rp. 3.364.747.781,00. Modal tersebut digulirkan sebagai pinjaman sebesar Rp. 2.33.579.600 yang digulirkan di 260 kelompok dengan jumlah anggota \pm 2.083 orang peminjam. Sedangkan saldo Rp. 929.168.181,00 di bank.

Perguliran bulan januari sampai dengan desember 2015 UPK telah menggulirkan SPP sebanyak Rp. 3.895.500.000,00 kepada 222 kelompok dengan jumlah anggota \pm 1.779 orang di sebelas desa kecamatan Dukuhseti. Dengan realisasinya sebagai berikut, tabel 4.3

TABEL 4.3

Realisasi Penyaluran SPP Tahun 2015

No.	BULAN	KELOMPOK	PERGULIRAN
1	Januri	12	Rp. 149.000.000
2	Februari	18	Rp. 330.500.000
3	Maret	13	Rp. 263.500.000
4	April	28	Rp. 488.000.000
5	Mei	9	Rp. 162.000.000
6	Juni	37	Rp. 621.500.000
7	Juli	34	Rp. 604.500.000
8	Agustus	6	Rp. 118.500.000
9	September	13	Rp. 243.000.000

10	Oktober	20	Rp. 327.500.000
11	November	9	Rp. 186.500.000
12	Desember	23	Rp. 401.000.000
	Total	222	Rp. 3895.500.000

Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban SPP Kecamatan Dukuhseti Tahun 2015

Tabel 4.2 menunjukkan realisasi penyaluran SPP tahun 2015 yaitu bulan januari disalurkan pada 12 kelompok di kecamatan Dukuhseti dengan jumlah dana sebesar Rp. 149.000.000, bulan febuari SPP disalurkan kepada 18 kelompok dengan dana sebesar Rp. 330.500.000, bulan maret SPP disalurkan pada 13 kelompok dengan dana sebesar Rp. 263.500.000, bulan april SPP disalurkan kepada 28 kelompok dengan dana sebesar Rp. 488.000.000, bulan mei SPP disalurkan kepada 9 kelompok dengan dana sebesar Rp. 162.000.000, bulan juni SPP disalurkan kepada 37 kelompok dengan dana sebesar Rp. 621.500.000, bulan juli SPP digulirkan kepada 34 kelompok dengan dana sebesar Rp. 604.500.000, bulan agustus SPP digulirkan kepada 6 kelompok dengan dana sebesar Rp. 118.500.000, bulan september SPP digulirkan kepada 13 kelompok dengan dana sebesar Rp. 243.000.000, bulan oktober SPP digulirkan kepada 20 kelompok dengan dana sebesar Rp. 327.500.000, bulan november SPP digulirkan kepada 9 kelompok dengan dana sebesar Rp. 401.000.000, bulan desember SPP digulirkan kepada 23 kelompok dengan dana sebesar Rp 401.000.000. Total keseluruhan dana SPP

kecamatan Dukuhseti yang digulirkan periode januari sampai dengan desember 2015 sebanyak Rp. 3895.500.000.

Mekanisme perguliran SPP Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) kecamatan Dukuhseti menyesuaikan pengajuan proposal yang diterima. Setiap kelompok yang telah menyelesaikan angsuran SPP selama 12 bulan berhak mengajukan proposal pinjaman kembali. Jadi perguliran dana SPP tidak dilaksanakan secara bersamaan melainkan sesuai kebutuhan kelompok.³ Sampai dengan akhir desember 2015 pengembalian pinjaman kelompok cukup efektif yaitu sebesar 98,3%.

Adapun penerima manfaat SPP desa Dukuhseti sebanyak 20 kelompok pada tahun 2015. Besar pinjaman tiap-tiap kelompok berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan pinjaman dan lama menjadi anggota SPP. Pinjaman awal menjadi anggota sebesar Rp. 1.000.000, dengan kenaikan Rp. 500.000 setiap mengajukan proposal kembali. Tingkat jasa pengembalian pinjaman perbulan sebesar 1,5% di UPK. Setiap kelompok terdiri dari 8 sampai 10 orang anggota. Adapun besaran SPP dan angsuranya dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini:

³ Wawancara Ketua Pelaksana SPP Kecamatan Dukuhseti

TABEL 4.3**Daftar Penerima Manfaat dan Angsuran SSP Perguliran
Desa Dukuhseti Tahun 2015**

No	Nama Kelompok	Besar Pinjaman Kelompok	Besar Angsuran Perbulan Kelompok	Total Pengembalian Kelompok ke UPK
1	Mekar Sakti I	Rp. 19.500.000	Rp. 1.917.500	Rp. 23.010.000
2	Dahlia I	Rp. 25.000.000	Rp. 2.458.333	Rp. 29.500.000
3	Dahlia II	Rp. 12.500.000	Rp. 1.229.167	Rp. 14.750.000
4	Merpati I	Rp. 30.000.000	Rp. 2.950.000	Rp. 35.400.000
5	Merpati II	Rp. 30.000.000	Rp. 2950.000	Rp. 35.400.000
6	Yasinan I	Rp. 10.000.000	Rp. 983.333	Rp. 11.800.000
7	Yasinan I A	Rp. 9.500.000	Rp. 934.167	Rp. 11.210.000
8	Yasinan II	Rp. 21.000.000	RP. 2.065.000	Rp. 24.780.000
9	Yasinan III	Rp.	Rp.	Rp.

		16.000.000	1.573.333	18.880.000
10	Rajawali I	Rp. 15.000.000	Rp. 1.475.000	Rp. 17.700.000
11	Rajawali II	Rp. 16.500.000	Rp. 1.622.500	Rp. 19.470.000
12	Rajawali III	Rp. 20.500.000	Rp. 2.015.833	Rp. 24.190.000
13	Rajawali IV	Rp. 10.000.000	Rp. 983.333	Rp. 11.800.000
14	Teratai I A	Rp. 6.000.000	Rp. 590.000	Rp. 7.080.000
15	Teratai I	Rp. 19.500.000	Rp. 1.917.500	Rp. 23.010.000
16	Teratai II	Rp. 14.500.000	Rp.1.425.833	Rp. 17.110.000
17	Mekar Sakti II	Rp. 12.000.000	Rp. 1.180.000	Rp. 14.160.000
18	Rajawali Indah II	Rp. 13.500.000	Rp. 1.327.500	Rp. 15.930.000
19	Bugenvil	Rp. 25.000.000	Rp. 2.458.333	Rp. 29.500.000
20	Rajawali Indah	Rp. 18.500.000	Rp. 1.819.167	Rp. 21.830.000
Total 2015		Rp. 287.500.000	Rp. 28.270.833	Rp. 339.250.000

Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban SPP Kecamatan Dukuhseti Tahun 2015

Tabel 4.3 menjelaskan bahwa besar pinjaman dana SPP yang bergulir di desa Dukuhseti pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 287.500.000 dengan rincian sebagai berikut: kelompok Mekar Sakti I Rp. 19.500.000, Dahlia I Rp. 25.000.000, Dahlia II Rp. 12.500.000, Merpati I Rp. 30.000.000, Merpati II Rp. 30.000.000, Yasinan I Rp. 10.000.000, Yasinan I A Rp. 9.500.000, Yasinan II Rp. 21.000.000, Yasinan III Rp. 16.000.000, Rajawali I Rp. 15.000.000, Rajawali II Rp. 16.500.000, Rajawali III Rp. 20.500.000, Rajawali IV Rp. 10.000.000, Teratai I A Rp. 6.000.000, Teratai I Rp. 19.500.000, Teratai II Rp. 14.500.000, Mekar Sakti II Rp. 12.000.000, Rajawali Indah II Rp. 13.500.000, Bugenfil Rp. 25.000.000, Rajawali Indah Rp. 18.500.000.

Besar pinjaman kelompok satu dengan kelompok yang lain berbeda, begitupula dalam satu kelompok besar pinjaman masing-masing anggota berbeda-beda karena menyesuaikan lamanya menjadi anggota, jenis usaha dan kelancaran dalam pengembalian pinjaman.

Berdasarkan paparan implementasi tersebut dapat disimpulkan bahwa SPP yang digulirkan sudah sesuai dengan prosedur yang di ajukan di PNPM mandiri pedesaan.

B. Peranan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Pada Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Di Tinjau Dari Segi Ekonomi Islam

Pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan memperkuat atau memberdayakan kelompok masyarakat lemah. Sebagai tujuan, pemberdayaan merupakan hasil yang ingin dicapai dari proses pemberdayaan itu sendiri yakni terciptanya masyarakat yang mampu secara fisik, sosial, maupun ekonomi.⁴

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Oleh sebab itu, setiap program yang dilaksanakan tentu saja bertujuan untuk memperbaiki atau mengubah kondisi yang ada menjadi kondisi yang lebih baik dan dapat menguntungkan semua pihak yaitu pemerintah sebagai penyedia dana dan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran.

PNPM Mandiri Pedesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Visi PNPM Mandiri Pedesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumberdaya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

⁴ Rosdiana Mustafa, *et al.*, h. 120

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan beberapa anggota kelompok, diantaranya kelompok Bugenvil, Merpati I, Merpati II, dan Rajawali Indah, dana pinjaman yang memang benar-benar digunakan untuk mengembangkan usaha mikro mampu meningkatkan penghasilan masyarakat. Sedangkan beberapa peminjam yang pinjamannya digunakan untuk selain kegiatan usaha hanya sampai pada gali lubang tutup lubang. Selain itu masyarakat yang usahanya pada bidang pertanian merasa pinjaman modal dari SPP belum mampu mencukupi kebutuhan modal mereka yang lumayan nialinya. Sehingga mereka masih membutuhkan pinjaman dari lembaga keuangan lainnya.

Dari pemaparan tersebut dapat dilihat bahwa peran SPP di desa Dukuhseti belum bisa dirasakan masyarakat secara menyeluruh, hal tersebut dikarenakan belum optimalnya prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat serta minimnya pengawasan dan pembinaan dari UPK.

Salah satu ciri khas dari ekonomi Islam adalah memandang bahwa hak milik sebagai titipan (amanah) dari Allah SWT yang mana cara perolehan dan penggunaannya akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat.⁵ Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surat Ali-Imran ayat 109, yang berbunyi:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿١٠٩﴾

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009, Cetakan Kedua, hal. 8

Artinya: “ Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi; dan kepada Allahlah dikembalikan segala urusan”.

Sehingga dengan demikian posisi manusia hanya sebagai pemegang amanah dari Allah SWT. Oleh karena itu seharusnya sifat amanah menjadi sifat dasar dari anggota kelompok SPP dan pengelolanya dalam menjalankan program simpan pinjam ini. Sifat amanah inilah yang nantinya dapat mewujudkan dari tujuan program SPP. Pada praktiknya pelaku-pelaku program SPP di desa dukuhseti belum sepenuhnya berperilaku amanah. Hal tersebut dapat kita lihat dari penyaluran SPP yang belum tepat sasaran, dan masih banyak anggota yang menggunakan dana pinjaman untuk selain kegiatan usaha. Mereka belum menyalurkan dan menggunakan dana pinjaman SPP dengan semestinya.

Mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kehidupan yang layak bagi kaum muslim merupakan kewajiban syar'i, yang jika disertai ketulusan niat karena Allah akan naik pada tingkat ibadah. Terealisasinya pengembangan ekonomi di dalam Islam adalah dengan keterpaduan antara upaya individu dan upaya pemerintah. Dimana peran individu sebagai asas dan peran pemerintah sebagai pelengkap.⁶ Dalam hal ini upaya pemerintah dalam pengembangan ekonomi adalah dengan memberikan bantuan berupa modal. Namun akan sia-sia jika modal tersebut tidak

⁶ Jaribah Ibn Ahmad Al-Haritsi, *Fiqih Ekonomi Umar Bi Al-Khathab*,(Terj), Jakarta:Khalifa, 2006, hal.735

tersalurkan dan tidak digunakan secara tepat oleh individu-individu yang berperan didalamnya.

Agama Islam menganjurkan umatnya untuk saling membantu dan tolong-menolong bahkan menjadi wajib apabila disekitar kita ada orang yang sangat membutuhkan bantuan dari kita dalam hal kebaikan. Demikian juga halnya tolong-menolong dalam memberikan pinjaman atau hutang kepada orang yang sangat membutuhkan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Ma'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Berdasarkan penuturan ayat diatas program Simpan Pinjam Perempuan termasuk salah satu bentuk tolong menolong berupa pinjaman modal untuk ibu rumah tangga yang kekurangan modal guna mengembangkan usahanya, yang mana persyaratan dalam mengajukan pinjaman tersebut tidaklah sulit (tanpa agunan). Hal tersebut selaras dengan tujuan ekonomi islam yaitu mensejahterakan umat.

Perihal bunga pinjaman yang dibebankan kepada nasabah perlu kita telisik terlebih dahulu bahwasanya dasar pengharaman riba adalah kedzaliman dan ketidakadilan dalam pinjaman tersebut. Adapun hasil pengamatan peneliti dalam penelitian ini bahwasanya masyarakat penerima manfaat pinjaman dana SPP mengatakan tidak merasa keberatan dengan pembebanan bunga sebesar 1.5 persen dari pinjaman SPP.

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa masyarakat tidak merasa terbebani dengan bunga yang ada. Sejauh ini mereka yang menggunakan dana pinjaman SSP untuk menambah modal usaha dapat mengembalikan pinjaman tepat waktu. Dengan hadirnya program SPP mereka merasa tertolong dengan adanya pinjaman dari program SPP ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan pada bab sebelumnya untuk menjawab rumusan masalah yang ada adalah, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di desa Dukuhseti kecamatan Dukuhseti kabupaten Pati pada tahun 2015 dapat ditinjau dari:

1. Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) diperuntukkan rumah tangga miskin yang produktif.

Hal ini dapat dilihat dari total 38 orang anggota penerima manfaat SPP, jumlah anggota penerima yang tepat sasaran atau sesuai dengan daftar masyarakat miskin Dinas sosial sebanyak 10 orang anggota.

2. Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) bertujuan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin, hal ini dapat diketahui bahwa sebelum ada SPP pendapatan anggota sebesar Rp. 50.000 dan setelah ada SPP pendapatan anggota naik menjadi Rp. 75.000
3. SPP memiliki prosedur pengajuan pinjaman sampai dengan pencairan.

4. Besar dana SPP yang digulirkan di desa Dukuhseti pada tahun 2015 sebesar Rp. 339.250.000 untuk 20 kelompok.
2. Peran SPP di desa Dukuhseti belum bisa dirasakan masyarakat secara menyeluruh, hal tersebut dikarenakan belum optimalnya prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat serta minimnya pengawasan dan pembinaan dari UPK.
3. Dasar pengharaman riba adalah kedzaliman dan ketidakadilan dalam pinjaman tersebut. Adapun hasil pengamatan peneliti dalam penelitian ini bahwasanya masyarakat penerima manfaat pinjaman dana SPP mengatakan tidak merasa keberatan dengan pembebanan bunga sebesar 1.5 persen dari pinjaman SPP.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian diatas, maka peneliti merekomendasikan sebagai berikut:

1. Sebelum menyetujui pinjaman yang diajukan sebaiknya tim verifikasi lebih teliti dengan cara mensurvei terlebih dahulu peminjam, sudah memenuhi kriteria atau belum. Hal tersebut dilakukan agar pinjaman SPP tepat sasaran.
2. Penerima pinjaman hendaknya menggunakan dana tersebut benar-benar untuk keperluan usaha bukan untuk keperluan yang bersifat konsumtif.

C. Penutup

Alhamdulillahirobbil'aalamiin puji syukur kehadiran Allah SWT, dengan hidayah, inayah, dan taufiqNya penulis telah mampu mengantarkan pembahasan skripsi yang berjudul

(Implementasi PNPM Mandiri Pedesaan Pada Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan Di Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tahun 2015), telah sampai pada ujung penyelesaian. Alhamdulillah, bersamaan dengan beberapa hambatan dan juga motivasi yang senantiasa mengiringi proses penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, semoga hasil karya ini bermanfaat dan menjadi motivasi bagi penulis untuk melahirkan karya-karya berikutnya tentu saja yang lebih baik. Tidak lupa penulis mohon maaf apabila dalam penulisan kalimat maupun bahasanya masih dijumpai banyak kekeliruan. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan dimasa mendatang. Sebelum dan sesudahnya penulis mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT dan kepada semua pihak yang telah memberi kelancaran dalam penulisan karya skripsi ini. Semoga dapat bermanfaat, amiin yaa robbal'aalamiin.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. *Pembangunan Pedesaan pendekatan partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*, Yogyakarta: Graha Ilmu , Edisi Pertama, 2013.
- Al-Haritsi, Jaribah Ibn Ahmad. *Fiqih Ekonomi Umar Bi Al-Khathab*,(Terj), Jakarta: Khalifa, 2006.
- Anshori, Abdul Ghofur . *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Cetakan Kedua, 2009.
- AN-Nawawi, Imam. *Al Majmu' Syarah Al Muhadzab*, Penerjemah Ahmad Yunus, Jakarta: Pustaka Azzam, Cetakan Pertama, 2015.
- Badan Pusat Statistika . *Analisis dan Penghitungan Tingkat kemiskinan Tahun 2008*, Jakarta: Badan Pusat Statistika, 2008.
- Departemen dalam Negeri Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, *Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan*, 2008.

- Dimas. Pemberdayaan kaum Dhu'afa Melalui Zakat, *Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, Volume 12 No. 2 Tahun 2012.
- Dzakir, Muhammad. Peranan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kecamatan Bangkinang Seberang Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam, Riau: Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011.
- Fauzi, Muchammad. *Metode Penelitian Kuantitatif Sebuah Pengantar*, Semarang: Walisongo Press, Cetakan 1, 2009.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-3, 2012.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Jurnal Pembangunan Masyarakat dan Desa, Volume II, Nomor 1, 2010.
- L. Mimbar. Peran Badan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMD) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat, *Jurnal Transformasi* , Volume 11, Nomor 1, 2015.

Suharto, Edi. *Membangun masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama, Edisi Pertama, 2014.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). *Program Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*.

Soetomo. *Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul Antitesisnya?* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan 1, 2011.

Jaya Dinata, Johara T. dan I.G.P. Pramandika, *Pembangunan Desa dalam Perencanaan*, Bandung: ITB, 2006.

Sutinah. Evaluasi Kegiatan Pinjaman Bergulir Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan (PNPM-Mpd) Di Kota Palembang (Studi Kasus Di Tiga Kelurahan), *Jurnal Administrasi Publik* , Volume 16 No. 01, 2016.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Cetakan Pertama, 2006.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-23, 2016.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Kuncoro, Mudrajat. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan kebijakan*, Yogyakarta: UPP AMP-YKPN, 2003.

Sri Hery Susilowati, Pendekatan Skala Ekuivalensi Untuk mengukur Kemiskinan, *Jurnal Penelitian Agro Ekonomi*, Volume 28, No 2, 2010.

Qardhawi, Yusuf. *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Terjemahan , Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, Cetakan Pertama, 2010.

Sutisna Sulaiman, Endang. *Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan Teori dan Implementasi*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2016.

Mustafa, Rosdiana, *et al.,. Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Perdamaian*, Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah, , Cetakan Pertama, 2009.

Saragi, Tumpal P. *Otonomi Masyarakat Desa Alternatif Pemberdayaan Desa*, Jakarta: CV. Cipiruy, 2004.

Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, cetakan pertama
, 2014.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, Cetakan 2, 2012.

Rodin, Dede. *Tafsir Ayat Ekonomi, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya,*
Cetakan 1, 2015.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al- Misbah, Jakarta: Lentera Hati, Vol. I,*
2002.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Faiqotun Nikmah
NIM : 132411176
Program Studi : Ekonomi Islam
Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 19 November 1994
Alamat Rumah : Rt 05, Rw 01, Dukuhseti,
Dukuhseti, Pati
No Telp : 0895377138761
e-mail : Sitifaiqotun.11@gmail.com
Riwayat pendidikan : 1. MI Himmatul Muta'allimin 01
Dukuhseti (2001-2007)
2. MTS Himatul Muta'allimin
Dukuhseti (2007-2010)
3. Diniyah Wustho Matholi'ul
Falah (2010-2011)
4. Madrasah Aliyah Matholiul
Falah (2011-2013)
5. Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang (2013-2017)